

**Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor
Impor Di Pelabuhan Panjang
(Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi
Terminal Petikemas)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh :

**ALFANI MAKMUR
NPM.1251010206**

Jurusan :Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1440 H / 2019 M

**Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor
Di Pelabuhan Panjang**

**(Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi
Terminal Petikemas)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

ALFANI MAKMUR

NPM : 1251010206

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E.

Pembimbing II : Vitria Susanti, M.Ec. Dev.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor
Impor Di Pelabuhan Panjang**
(Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal
Petikemas)

ABSTRAK

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah menjadi topik bahasan utama di bisnis global seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang di hadapi perusahaan. Hal ini sering dibicarakan setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dunia usaha seperti krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang diyakini sebagai akibat adanya kegagalan penerapan *Corporate Governance*. akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian di Indonesia seperti pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta menjadi terpuruk, termasuk merosotnya ekspor impor melalui pelabuhan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang dan bagaimana peranan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor yang di terapkan Di Pelabuhan Panjang menurut pandangan ekonomi islam. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menemukan dan meriview bagaimana peranan *Good Corporate Governance* Dalam meningkatkan kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang dan untuk menemukan dan mengetahui bagaimana peranan *Good Corporate Governance* Dalam meningkatkan kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang menurut pandangan ekonomi islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya. Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas). Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data dari data primer dan data sekunder.

Dari penelitian ini Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang sangat diperlukan. Dikarenakan fasilitas dan jasa yang diberikan pihak pelabuhan sangat mempengaruhi kinerja ekspor dan impor. Jika fasilitas dan pelayanan di pelabuhan semakin baik akan meningkatkan kinerja karyawan atau perusahaan dan ekspor impor. Dan untuk peranan *Good Corporate Governance* Dalam meningkatkan kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang menurut pandangan ekonomi islam di PT Pelabuhan Panjang walaupun

pelabuhan sudah menerapkan nilai-nilai dalam islam dan memberikan peranannya terhadap aktifitas ekspor impor yang ada di pelabuhan panjang dengan cara memberikan pelayanan yang cukup baik namun hal ini tidak begitu berpengaruh secara signifikan, karena masih adanya penurunan jumlah ekspor pada tahun 2015 sampai tahun 2017.

Kata kunci : Peranan GCG, Pelayanan yang baik , Kinerja Ekspor Impor





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin Sukarame 1 Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Peranan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas)**

Nama : **Alfani Makmur**

NPM : **1251010206**

Jurusan : **Ekonomi Syariah**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Ahmad Habibi, S.E., M.E.
NIP. 197905252009121002

Pembimbing II

Vitria Susanti, M.Ec., Dev
NIP. 19780918200512005

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomidan Bisnis Islam

Madnasir, S. E., M. Si
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas)**, disusun oleh **Alfani Makmur 1251010206**, Jurusan Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/tanggal :

TIM MUNAQASYAH

Ketua

: Madnasir, S.E., M.S.I

(.....)

Sekretaris

: Okta Suprianingsih, S.E., M.E.Sy

(.....)

Penguji I

: M. Kurniawan S.E., M.E.Sy

(.....)

Penguji II

: Vitria Susanti, M.A., M.Ec.Dev

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruklon Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 19800801 200312 1 001

MOTTO

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki.”(Q.S Al-Jumu’ah :11)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fahrudin dan Ibunda Rosnaini, terimakasih untuk cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti.
2. Kedua adik tercinta, Fatrick Fahrudin, dan Megawati Putri yang telah memberikan dukungan dan semangat tiada henti.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu ku banggakan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 09 Juli 1994 dan dianugerahi sebuah nama oleh ayahandanya dan ibundanya yaitu Alfani Makmur. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Fahrudin (Alm) dan Ibu Rosnaini.

Riwayat Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis adalah :

1. Taman Kanak-Kanak Setia Kawan Panjang tamat dan berijazah pada tahun 2000
2. Sekolah Dasar di SD N 1 Karang Maritim tamat dan berijazah pada tahun 2006.
3. Sekolah menengah Pertama di SMP Kartika II-2 (Persit) tamat dan berijazah pada tahun 2009.
4. Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Bandar Lampung tamat dan berijazah pada tahun 2012.

Kemudian pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung Program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Islam kemudian beralih status menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) Program Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman islamiyah yang penuh dengan IPTEK serta diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.

2. Bapak Madnasir, S.E., M.S.I. selaku ketua jurusan Ekonomi Syariah.
Terima kasih atas petunjuk dan arahan yang diberikan selama masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku pembimbing I dan Ibu Vitria Susanti, M.Ec., Dev selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, perhatian, bimbingan, nasehat dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. PT. Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas terimakasih telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan Bapak agus Hendrianto selaku General Manager Perusahaan serta segenap jajaran staff kantor, terimakasih atas bimbingan serta ilmunya selama penulis melakukan penelitian.
6. Orang tua dan adikku dan semua keluarga yang selalu berdo'a dengan tulus dan memberiku motivasi untuk keberhasilanku.
7. Sahabatku tercinta Fitri Anjani S.E, Elfandy Achmad S.E, Estelee Elora Akbar S.E, Asri Mutia S.E, Rusmala Dewi, S.E, Arief Arrohman, S.E, Ahmad Soni Yuliansyah, S.E, Putri Pertiwi S.E, Sella Oktavia Setiawan S.E, Nabiella Deffa Agasy S.E, Dian Holiviani Fajar Kurniawan S.E,

Rachmat Hidayat S.sos Krisna Mahardika S.H, Zulfikri S.kom, terimakasih atas kebersamaan dan bersahabat sampai detik ini.

8. Teman–teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2012 khususnya kelas F terima kasih atas kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do’a kehadiran Allah SWT, semoga jerih payah dan amal bapak-bapak dan ibu–ibu serta teman–teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik–baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2019

Alfani Makmur
NPM.1251010206

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Good Corporate Governance</i>	19
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	19
2. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	20
a. <i>Transparency</i>	20
b. <i>Accountability</i>	21
c. <i>Responsibility</i>	22
d. <i>Independency</i>	22
e. <i>Fairness</i>	23
3. Manfaat dan Pentingnya Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	23
4. Pedoman <i>Good Corporate Governance</i>	25
5. Tata cara Penelitian/Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN	26
6. Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	28
B. Kinerja Ekspor Impor	29
1. Pengertian Kinerja	28
2. Standar Kinerja.....	29
3. Fungsi Standar Kinerja	30
4. Persyaratan Standar Kinerja	31
5. Penilaian Kinerja	32
C. Pengertian Ekspor	33
D. Pengertian Impor	42
E. <i>Good Corporate Governance</i> Menurut Pandangan Islam.....	50
F. Tinjauan Pustaka	51

BAB III PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang	56
1. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia	56
2. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang	59
3. Keadaan Geografis dan Topografi Pelabuhan	60
4. Visi dan Misi Pelabuhan Panjang.....	61
5. Ruang Lingkup	62
6. Struktur Organisasi	70
B. Data <i>Good Corporate Governance</i> Pelabuhan Panjang	72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Peranan <i>Good Corporate Governace</i> Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang	90
B. Peranan <i>Good Corporate Governace</i> Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang Menurut Pandangan Ekonomi Islam	101

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	
1. Grafik Ekspor Impor Pelabuhan Panjang 2013-2017	6
2. Proses Bongkar Muat PT. Pelabuhan Indonesia	67
3.2 Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)	
Cabang Panjang	71
3.3 Struktur Organisasi Divisi Terminal Petikemas PT.	
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang	72
3.4 Distribusi Jawaban Indikator <i>Transparency</i> Keterbukaan	73
3.5 Distribusi Jawaban Indikator Akuntabilitas	75
3.6 Distribusi Jawaban Indikator Responsibility / Pertanggungjawaban	77
3.7 Distribusi Jawaban Indikator Independency / Kemandirian	78
3.8 Distribusi Jawaban Indikator Fairnes / Keadilan	80
3.9 Distribusi Jawaban Indikator Kualitas	82
3.10 Distribusi Jawaban Indikator Kuantitas	83
3.11 Distribusi Jawaban Indikator Tanggungjawab	84
3.12 Distribusi Jawaban Indikator Kerjasama	86
3.13 Distribusi Jawaban Indikator Inisiatif	87
4.1 Jumlah Ekspor dan Impor dalam Ton dari tahun 2013-2017	92

BAB I

PEDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang penulisan skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran terhadap judul skripsi ini yang berakhir dengan kesalahan dalam pemahaman dikalangan pembaca. Maka penulis akan menjelaskan dengan memberi arti pada beberapa istilah yang terkandung di dalam judul penelitian ini.

Penelitian yang akan dilakukan ini berjudul: **Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas)**. Adapun beberapa istilah yang perlu penulis uraikan yaitu sebagai berikut :

1. **Peranan** adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.¹
2. ***Good Corporate Governance*** adalah sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 445.

meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stockholders yang lain.²

3. **Kinerja** adalah kinerja yang merujuk pada tingkat keberhasilan melaksanakan tugas serta kemampuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik³
4. **Ekspor** adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir.⁴
5. **Impor** adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara ke Negara lain secara legal.⁵
6. **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.⁶

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul di atas adalah sebagai berikut:

² Supriyanto, 2000 "The Indonesian Institute For Corporate Governance", *Jurnal Ekonomi*, No. 1.

³Donnelly, Gibson and Ivancevich, *Organisasi dan Manajemen. Perilaku, Struktur, Proses*, Edisi keempat, (Jakarta: Erlangga, 1994), hlm. 41

⁴Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Terbaru, (Makasar: Gitamedia Press, 2012), hlm. 234.

⁵*Ibid.*, hlm. 432.

⁶ Undang-Undang Hukum Dagang, Pustaka Mahardika, (Yogyakarta, 2014), hlm. 410.

1. Secara Objektif

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang ada di pelabuhan bisa menjadi salah satu contoh penyebab baik buruknya kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang. Selain itu, kinerja ekspor impor yang diterapkanpun akan mempengaruhi nilai perusahaan itu sendiri. Maka dari itu peneliti tertarik meneliti permasalahan ini untuk melihat bagaimana peranan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan kinerja ekspor impor pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas ini memungkinkan untuk di adakan penelitian karena Badan milik pemerintah yang terintegritas dalam pelaporan dan ketersediaan data primer maupun sekunder dibanding dari badan usaha milik swasta. Mengingat literatur dan bahan informasi yang di perlukan cukup menunjang dan relevan dengan ilmu yang peneliti pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

2. Secara Subjektif

- a. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam. Serta tersedianya literatur ataupun sumber lainnya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan untuk menunjang referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan skripsi ini.
- b. Penelitian ini dirasa mampu untuk diselesaikan oleh penulis, mengingat adanya ketersediaan data maupun literatur yang cukup memadai berkaitan dengan penelitian baik data primer maupun

sekunder. Dan lokasi penelitian yang terjangkau dari segi transportasi dan diperbolehkan dalam proses penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) telah menjadi topik bahasan utama di bisnis global seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan tekanan persaingan bisnis yang di hadapi perusahaan. Hal ini sering dibicarakan setiap kali terjadi peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi dunia usaha seperti krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang diyakini sebagai akibat adanya kegagalan penerapan *Corporate Governance*. Akibat buruknya tatakelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian di Indonesia seperti pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta menjadi terpuruk, termasuk merosotnya ekspor impor melalui pelabuhan.

Good Corporate Governance sangat penting diterapkan dan diperhatikan agar terwujudnya praktek *Good Corporate Governance* yang baik dalam perusahaan seperti, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi dalam penerapan variabel GCG pada BUMN dikelompokkan dalam 6 faktor, yaitu pemegang saham dan RUPS/Pemilik modal, komitmen terhadap penerapan tata kelola

perusahaan yang baik, dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, pengungkapan dan keterbukaan informasi.

Menurut Adrian D. Lubis, kinerja ekspor impor di Pelabuhan dipengaruhi oleh peranan GCG itu sendiri, suatu proses peningkatan keberlangsungan kinerja ekspor impor barang salah satunya ditentukan oleh interaksi dari beberapa sub bagian yang ada dalam pelabuhan dan menjadi suatu kegiatan atau fungsi-fungsi guna mencapai tujuan perusahaan⁷, yaitu meningkatkan kinerja ekspor impor yang ada di pelabuhan.

Kegiatan ekspor impor barang didasari oleh suatu kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain tiap-tiap negara saling membutuhkan. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda dalam menyikapi kegiatan ekspor impor, baik dari strategi, sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, maka dari itu kinerja ekspor impor dapat dilihat dari bagaimana peranan *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh pihak Pelabuhan.

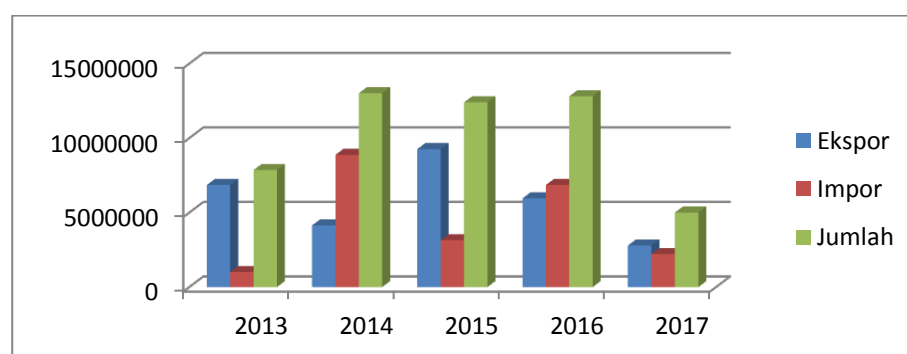
Dalam kinerja ekspor impor ada beberapa variable yang mempengaruhinya seperti harga komoditas, kapasitas produksi, nilai tukar, impor bahan baku penolong, dan harga BBM.⁸Fenomena perbedaan dalam menyikapi kegiatan ekspor impor ini menyebabkan tingkat persaingan global semakin ketat, karenanya tiap negara perlu mencermati dan menyikapi persaingan global secara cepat dan tepat melalui tata kelola perusahaan yang

⁷Adrian D. Lubis, Jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan, Vol. 4 No. 1, Jakarta, 2010.

⁸Tambunan, Tulus, *Kinerja Ekspor Manufaktur Indonesia. Kompartemen Industri Logam Dasar & Mesin dan LP3E*, (Indonesia: Kadin, 2001), hlm. 23.

baik (*Good Corporate Governance*) untuk meningkatkan kinerja ekspor impor di Pelabuhan. Dibiidang insdustri pemerintahan, PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang memiliki strategi industrialisasi yang bersifat multidimensional, yang memanfaatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam persaingan global, sehingga tujuan PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjangdapat terealisasi, yaitu meningkatnya kinerja ekspor impor dengan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Secara teoritis, PT. Pelabuhan Indonesia II menjadi bagian dari mata rantai transportasi laut, yaitu sebagai tempat pertemuan (*interface*) dua moda angkutan atau lebih serta berperan sebagai tempat mediasi dari berbagai kepentingan yang saling terkait. PT. Pelabuhan Indonesia II memiliki fasilitas bongkar muat barang untuk menunjang kegiatan ekspor impor dari mode darat ke mode laut, dan sebaliknya, serta memiliki beberapa strategi untuk meningkatkan kegiatan perdagangan terutama dalam aktifitas perdagangan antar negara, ekspor impor.

Gambar 1.1
Grafik Ekspor Impor Pelabuhan Panjang 2013-2017
(dalam Ton)



Sumber : Data Badan Pusat Statistik diolah tahun 2018

Dari kondisi diatas telah terjadi penurunan terhadap jumlah ekspor impor PT. Pelabuhan Indonesia II yang pada dasarnya PT. Pelabuhan Indonesia II telah mengimplmentasikan beberapa strategi dan meningkatkan fasilitas untuk meningkatkan kinerja ekspor impor yang penulis indikasikan penurunan tingkt ekspor impor terjadi akibat penerapan tata kelola perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang masih belum baik.

Dari latar belakang diatas dapat diketahui peran *Good Corporate Governance* dapat dikatakan merupakan sebuah cara bagi suatu Negara dalam meningkatkan kegiatan perekonomian terutama dalam aktifitas ekspor impor di Pelabuhan. Dan hal yang menarik untuk diteliti mengenai peran tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kinerja ekspor impor yang dituangkan dalam judul ***“Peranan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas).”***

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang ?
2. Bagaimana peranan *Good Corporate Governance* dalam Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor yang di terapkan Di Pelabuhan Panjang menurut pandangan ekonomi Islam ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dan meriview bagaimana peranan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang.
- b. Untuk menemukan dan mengetahui bagaimana peranan *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang menurut pandangan ekonomi Islam.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pembaca mengenai peranan PT Pelabuhan Indonesia II terhadap mekanisme ekspor impor. Selanjutnya akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam studi pada PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa dan lapisan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu ekonomi Islam di setiap perguruan tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan menjadi kontribusi pemikiran ilmiah bagi hukum positif di Indonesia dan normatif di Indonesia yang berkaitan dengan ilmu Ekonomi Islam.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.⁹

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Penelitian bersifat kualitatif ini hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁰

Dilihat dari jenisnya (menurut tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field research* yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya.¹¹ Penelitian *field research* dikerjakan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian berkenaan dengan Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja

⁹Suharsimi Arikunto, *Metodelogi penelitian*, (Yogyakarta: Bina Aksara, 2006), hlm.112

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 9.

¹¹Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: UGM, 2002), hlm. 142.

Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas).

Selain menggunakan *field research* penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam ruang lingkup kepustakaan.¹² Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 144.

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari para Pegawai PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai Peranan *Good Corporate Governance* Di Pelabuhan Panjang (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas).

b. Data Sekunder

Selain data primer, sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal maupun sumber internal.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, buku-buku literatur dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di lembaga-lembaga yang berkaitan dengan masalah. Data yang diperoleh dari lembaga ataupun instansi yaitu dari PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 87.

c. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian kualitatif menggunakan istilah “*Field research*” yaitu penelitian dalam kanca kehidupan yang sebenarnya namun tidak hanya itu, tetapi bisa juga berupa peristiwa alam, tumbuhan bahkan kendaraan sejenisnya.¹⁶ Dalam menetapkan besarnya sample (*sample size*) dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin dan Husein Umar sebagai berikut:¹⁷

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran Sampel

N : Ukuran Populasi

e : Persen Kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang masih ditolerir atau diinginkan, sebanyak 10%

Adapun populasi yang terdapat pada penelitian ini adalah karyawan yang ada di PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang yaitu berjumlah 150 orang.¹⁸ Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang di ambil dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh dari karyawan PT. Pelabuhan Indonesia cabang Panjang, maka :

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

¹⁷ Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 146.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018.

$$n = \frac{150}{1+150 (0,1)^2} = 60$$

Dengan demikian, jumlah sampel untuk karyawan PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang adalah 60. Untuk menggunakan ukuran sampel, penulis menggunakan teknik pengambilan sampling probability, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹⁹

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung pada PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas untuk mengamati objek penelitian secara langsung dan lebih mendalam guna mendapatkan informasi.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 118.

²⁰Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 203.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti.²¹ Metode *Interview* yaitu proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi yang diberikan.²²

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di wawancaradalam penelitian ini adalah PegawaiPT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto adalah mencari dan mengenal hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan notulen rapat. Sedangkan menurut Koentjoroningrat

²¹Husein Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 163

²²*Ibid.*, hlm. 64

metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²³

d. Kuisisioner

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab agar memperoleh informasi yang dibutuhkan.²⁴ Dengan cara melakukan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk pertanyaan kepada responden terkait dengan kualitas dan kuantitas perusahaan atau karyawan sehingga responden dapat memberikan jawaban atas pertanyaan secara tertulis.

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan melalui penulisan yang berkenaan dengan penelitian. Seiring dengan pendapat diatas maka dengan ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas.

4. Pengolahan Data dan Analisis

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analisis yaitu teknik untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang terkait dengan pembahasan, dimana teknik ini

²³ Koentjoroningrat, "*Metodologi Penelitian Masyarakat*", (Jakarta: Gramedia, 2001), hlm. 46.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 83.

menggambarkan tentang Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor yang diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas. Untuk mendapatkan data yang lebih akurat perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*

Memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁵ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber dokumentasi.

Data yang penulis ambil tentang Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor yang diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang di dapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut.

²⁵*Ibid.*, hlm. 153.

b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.²⁶

Teknik ini merupakan langkah kedua setelah *editing*, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami tentang permasalahan yang ada pada PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas. Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor yang diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas.

c. *Analyzing*

Metode analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode analisa dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan dari yang khusus ke umum.

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.²⁷

²⁶*Ibid.*, hlm. 154.

²⁷*Ibid.*, hlm. 195

Hasil yang masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mengandung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.²⁸

Menurut penulis *analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar-samar dan semu, kemudian bila diteliti lebih lanjut akan semakin jelas karena data yang diperoleh dan hasilnya pun akan lebih sempurna, pada teknik ini peneliti akan menganalisis Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor diterapkan oleh PT Pelabuhan Indonesia II (*Persero*) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), hlm. 300.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Kata governance berasal dari baha perancis yaitu gubernance, yang berarti pengendalian. Lalu kata tersebut di pergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau jenis organisasi yang lain, menjadi *corporate governance*. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committe di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Good Corporate Governance* diseluruh dunia.¹

Organization for Economic Cooperation and Development (2004) dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.²

¹Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, (Jakarta: Mandar Maju 2012), hlm 24.

² *Ibid.*

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dan pemilik kepentingan lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah untuk mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* yang perlu diperhatikan agar terwujudnya praktek *Good Corporate Governance* yang baik adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan.

a. *Transparency*

Ialah pengungkapan pada setiap kebijakan atau aturan yang akan digunakan perusahaan, sebab kepercayaan mitra, investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat dan tepat waktu. Beberapa hal yang

harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip transparansi ini, yaitu³:

- 1) Mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- 2) Mengembangkan teknologi informasi (information technology) dan sistem informasi manajemen (management information system) dalam menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif dari pihak komisaris dan manajer.
- 3) Mengembangkan manajemen risiko korporasi (enterprise risk management) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
- 4) Mengumumkan adanya jabatan kosong agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara yang kolusif atau nepotisme.

b. *Accountability*

Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan dalam mewujudkan prinsip ini, yaitu:

³ Daniri Achmad, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Ray Indonsia, 2005), hlm. 27.

- 1) Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan dengan waktu dan cara yang tepat.
- 2) Perusahaan harus melakukan pengembangan pada komite audit dan risiko sebagai pendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
- 3) Perusahaan harus melakukan pengembangan dan perumusan kembali pada peran dan fungsi auditor internal.
- 4) Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang profesional.

c. *Responsibility*

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku yang dimaksud termasuk yang berkaitan dengan masalah hubungan industrial, masalah pajak, masalah perlindungan lingkungan hidup, masalah standar penggajian dan masalah kesehatan/keselamatan kerja.

d. *Independency*

Berdasarkan KNKG pada buku pedoman umum GCG, (2006) independensi merupakan salah satu prinsip pada *Good Corporate Governance* yang mewajibkan perusahaan harus dikelola secara

independen dan professional sehingga setiap organ yang ada di dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan mengintervensi pihak lain.⁴

e. *Fairness*

Didefinisikan sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang muncul berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta perjanjian terhadap stakeholder. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Dengan adanya prinsip *fairness* diharapkan dapat memberi perlindungan kepada perusahaan. Dengan kata lain, *fairness* menjadi mata dalam memantau dan menjamin perlakuan adil di antara bermacam-macam kepentingan di dalam sebuah perusahaan⁵

3. Manfaat Dan Pentingnya Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional bagi Pengelola Perusahaan yang Baik, Manfaat GCG bagi Perusahaan adalah:

- a. Alokasi sumber daya secara efisien
- b. Pengembalian keputusan secara efektif
- c. Arah perusahaan yang jelas
- d. Peningkatan efisiensi
- e. Lingkungan kerja yang kondusif

⁴Forum for Good Corporate Governance in Indonesia (FCGI), *Seri Tata Kelola Perusahaan yang Baik*”, Edisi 3 jilid 1, (Jakarta: FCGI, 2001), hlm. 24

⁵*Ibid.*,

- f. Sumbangan positif
- g. Kinerja yang terpercaya

Selanjutnya menilai pentingnya GCG untuk perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.⁶
- b. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Manfaat *Good Corporate Government* Bagi Pemodal Publik adalah :

- a. Kesetaraan perlakuan
- b. Hak-hak terlindungi
- c. Penghasilan yang berkesinambungan

⁶ Achmad D. Mas, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, Edisi.2, (Jakarta: Jagad Prima Mandiri, 2005), hlm 93.

4. Pedoman *Good Corporate Governance*

Pada tanggal 29 November 2000 secara resmi (KNKCG) atau Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance menetapkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Penyusunan pedoman tersebut sesuai dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 31/M.Ekuin/06/2000. KNKCG juga merekomendasikan perbaikan perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi code tersebut, antara lain:

- a. Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- b. Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Pendaftaran Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan terhadap informasi perusahaan.
- c. Memperbaiki dan meningkatkan standar-standar akunting, termasuk aturan-aturan tentang pembentukan Komite Audit dan Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*).
- d. Memperbaiki dan meningkatkan aturanaturan yang berkaitan dengan keterbukaan, memperbaiki dan meningkatkan aturanaturan pada Pasar Modal, termasuk mendukung terbentuknya Financial Supervisory Agency yang baru, sebagai bagian dari undang-undang tentang Central Bank yang baru.
- e. Memperbaiki dan meningkatkan aturanaturan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

- f. Memperbaiki dan meningkatkan aturanaturan pada sektor perbankan.

Menurut Adrian Sutedi adapun sebagai upaya pengembangan kerangka kerja dalam pelaksanaan Pedoman bagi Pengelola Perusahaan yang baik, pihak KNKCG telah melakukan beberapa usaha-usaha antara lain⁷:

- a. Pedoman bagi Pengelola Perusahaan yang baik telah diajukan kepada pemerintah sebagai inisiatif dari sektor swasta untuk digunakan sebagai acuan dan referens dalam mengatur berbagai macam sektor-sektor swasta, profesi-profesi penunjang dan bahan pelatihan bagi para manajer.
- b. Lembaga pemeringkat independen akan melakukan pemeringkatan kepatuhan perusahaan sebagai bagian dari mekanisme pengontrolan oleh publik.
- c. Pedoman bagi Pengelolaan Perusahaan yang baik akan diterapkan seperti halnya standar dalam industri (contohnya ISO 9000).

5. Tata Cara Penilaian/Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Menurut SK-16/S.MBU/2012 pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk: Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 27 No. 2 Oktober 2015| 4 administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id

- a. Penilaian (*Assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan

⁷ Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 79

penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun.

- b. Evaluasi (*Review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya.⁸

Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi dalam penerapan GCG pada BUMN dikelompokkan dalam 6 (enam) faktor atau aspek yang terdiri dari:

- a. Pemegang saham dan RUPS / Pemilik Modal;
- b. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
- c. Dewan komisaris/dewan pengawas;
- d. Direksi;
- e. Pengungkapan dan keterbukaan informasi;
- f. Faktor lainnya.

Faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam suatu parameter atau subindikator ditetapkan atas dasar klasifikasi sebagai berikut:

- a. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
- b. Keberadaan SOP/Kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (pemegang saham/RUPS, dewan

⁸ Bagus M. Minsa Prastantio, 2012, "Analisis *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan", *Jurnal Ekonomi*, No. 1. Malang.

komisaris/dewan pengawas dan direksi) termasuk kelengkapan muatan SOP/Kebijakan/aturan main;

- c. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
- d. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/Kebijakan/aturan main;
- e. Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
- f. Keluaran atau output atas proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN;
- g. Kualitas keluaran output yang dihasilkan

6. Struktur *Corporate Governance*

Struktur didefinisikan sebagai satu cara bagaimana aktivitas dalam organisasi dibagi, diorganisir, dan dikoordinasi. Struktur merupakan suatu bentuk kerangka dasar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang ada agar dapat digunakan, bekerja dan melaksanakan suatu fungsi. Struktur *Corporate Governance* merupakan bentuk penggambaran hubungan berbagai kepentingan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Gambaran dari struktur *Corporate Governance* berguna dalam menentukan arahan strategis, kinerja sistematis dan pengawasan kinerja perusahaan.⁹

⁹ Arifin, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia*, (Semarang: UNDIP, 2005), hlm. 54.

B. Kinerja Ekspor Impor

1. Pengertian kinerja

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya¹⁰

Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.¹¹

Lalu dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah pencapaian atau hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaiannya.

2. Standar Kinerja

Standar kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi, dan merupakan pembanding (benchmark) atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang diambil. Standar kerja yang baik harus realistis, dapat diukur dan mudah dipahami dengan jelas sehingga bermanfaat baik bagi organisasi maupun para karyawan.

¹⁰Prabu Anwar Mangkunegara, *Manajemen Sumber daya Manusia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 25.

¹¹Hamzah Ahmad Nanda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Fajar Mulia, 1996), hlm. 250.

Standar kinerja menurut Wilson adalah tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan, dan merupakan pembandingan (*benchmark*) atas tujuan atau target yang ingin dicapai, sedangkan hasil pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh seorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan atau standar kinerja.¹²

3. Fungsi Standar Kinerja

Standar kinerja sebagaimana yang dijelaskan Abdullah, memiliki fungsi antara lain:¹³

- a. Sebagai tolok ukur (*benchmark*) untuk menentukan keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja ternilai.
- b. Memotivasi karyawan agar bekerja lebih keras untuk mencapai standar. Untuk menjadikan standar kinerja yang benar-benar dapat memotivasi karyawan perlu dikaitkan dengan reward atau imbalan dalam sistem kompensasi.
- c. Memberikan arah pelaksanaan pekerjaan yang harus dicapai, baik kuantitas maupun kualitas.
- d. Memberikan pedoman kepada karyawan berkenaan dengan proses pelaksanaan pekerjaan guna mencapai standar kinerja yang ditetapkan.

¹²Bangun, Wilson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 44.

¹³Abdullah, M, "*Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*", Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014.hlm. 39

4. Persyaratan Standar Kinerja

Agar dapat digunakan sebagai tolok ukur (*benchmark*), maka standar kinerja harus memiliki persyaratan-persyaratan tertentu. Persyaratan persyaratan standar kinerja sebagaimana yang dijelaskan Abdullah antara lain:¹⁴

- a. Terdapat hubungan yang relevan dengan strategi organisasi.
- b. Mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya.
- c. Memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kontrol karyawan.
- d. Memperhatikan teknologi dan proses produksi.
- e. Sensitif, dapat membedakan antara kinerja yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.
- f. Memberikan tantangan kepada karyawan.
- g. Realistis, dapat dicapai oleh karyawan.
- h. Berhubungan dengan waktu pencapaian standar.
- i. Dapat diukur dan ada alat ukur untuk mengukur pencapaian standar.
- j. Standar harus konsisten.
- k. Standar harus adil.
- l. Standar harus memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan.

¹⁴ *Ibid.*

5. Penilaian Kinerja

Terdapat kurang lebih 2 syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu:

- a. Adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif dan
- b. Adanya objektivitas dalam proses evaluasi.

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen SDM.

Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis. Dengan demikian, dalam melakukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinyu antara para pejabat pimpinan dan bagian kepegawaian. Untuk mempertegas dan memperjelas bagaimana penilaian kinerja dalam suatu organisasi dapat menghasilkan individu-individu yang berkualitas maka Malayu S P

Hasibuan menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah menilai rasio dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap karyawan.

C. Pengertian Ekspor

Secara definitif yang di maksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan yang di maksud dengan eksportir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakuakn ekspor. Dikatakan demikian sebab transaksi dan realisasi ekspor bisa dilakukan oleh seorang individu yang usahanya berbentuk usaha perseorangan, yaitu firma atau UD, atau sekedar nama toko tanpa legalitas badan hukum. Dengan kata lain perizinan usahanya berbentuk SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) tanpa memiliki akta pendirian perusahaan yang diterbitkan oleh notaries, tanpa legalisir pengadilan negeri setempat, dan tanpa izin operasional dari Menkun dan Ham RI.

Sedangkan yang di maksud dengan daerah pabean secara definitive adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruangudara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang no. 17 tahun 2006. Sebelum mengirimkan barang-barang ekspor ke gudang Lini I di Pelabuhan, eksportir haris mengajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang diterbitkan oleh bank devisa yang di tunjuk. Bank devisa ini disepakati oleh pihak importir dan bank devisanya di luar negeri untuk

kemudian PEB ini dimitakan persetujuan Fiat masuk dari Kepala Hangar Bea Cukai di Gudang Lini I.

Secara definitif PEB adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan ekspor barang. Sedangkan yang di maksud dengan kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, Bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai.¹⁵

1. Persyaratan Untuk Menjadi Eksportir

Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan no.558/MPP/KEP/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Menteri Perdagangan no.07/M-DAG/PER/2005 tanggal 19 April 2005, ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perseorangan yang telah memiliki:

- a. Tanda Daftar Usaha Pedagangan (TDUP)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). SIUP inibisa di urus di kantor Disperindag setempat yang secara organistatoris dan administrative berada di bawah naungan wali kota atau bupati setempat. Surat ini bias diajukan oleh siapa pun, baik eksportir berbentuk badan hukam (CV dan PT) ataupun berbentuk usaha perorangan (Firma,UD/usaha dagang, took, dan sejenisnya).

¹⁵*Op.Cit*, Sasono Herman Budi, hlm 119.

- b. Izin usaha dari departemen teknis/lembaga pemerintah non-departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konkretnya eksportir harus minta Angka Pengenal Ekspor (APE) dari Departemen Perdagangan RI tingkat provinsi. Namun, walaupun eksportir tidak memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) tersebut, eksportir tetap bias merealisasi transaksi ekspornya. Perbedaannya adalah perlakuan Inspeksi Pajak atas beban pajak ekspor hanya 2,5%.
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan/diterbitkan Disperindag setempat sebagai kelanjutan sebagai eksportir yang sudah mendapatkan SIUP. Oleh karena itu, perusahaan harus mendaftarkan perusahaannya. Untuk itu diterbitkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Pengajuan permohonan TDP dilampiri fotokopi KTP/Passport Pemilik Perusahaan, fotokopi NPWP Badan Hukum/Usaha Perorangan, fotokopi APE, fotokopi, Akte Pendirian dan perubahan yang disalahkan pengadilan negeri setempat (untuk eksportir berbentuk CV), dan ditambah SK Men Kum dan Ham (untuk perusahaan berbentuk PT). Untuk perpanjangan TDP, eksportir harus melampirkan TDP asli/lama.¹⁶

2. Prosedur dan Mekanisme Ekspor

Usaha perorangan atau usaha yang berbentuk badan hokum bias melakukan transaksi ekspor dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

¹⁶*Ibid.*

- a. Eksportir berkomunikasi dengan rekannya di luar negeri (calon importir) dan komunikasi ini biasa dilakukan melalui facsimile, atau telpon interlokal, atau melalui jaringan internet atau bertatap muka langsung dengan pihak importir. Guna untuk mendapatkan kesepakatan harga, kualitas barang, bentuk pengepakan barang, dokumen-dokumen ekspor yang di butuhkan/diwajibkan di Negara importir, tanggal pengiriman barang pihak kapal (Latest Shipment Date). Kondisi harga barang apakah CIF, FOB, C&F ataukah kondisi lainnya, kapal yang di tunjuk guna mengangkut barang berbendera nasional Negara mana, dan lain-lain, serta detail kesepakatan transaksi ekspor impor tersebut. Langkah selanjutnya kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai tersebut di tuangkan kedalam kontrak penjualan/sales kontrak tersebut. Mengenai sales kontrak ini dapat dijelaskan bahwa kontrak ini tidak mempunyai ikatan hukum, hanya ikatan moril. Artinya bila salah satu pihak mengingkari isi kontrak, yaitu membatalkan transaksi ekspor impornya, maka pihak yang lain tidak bias melakukan gugatan perdata guna meminta ganti rugi. Namun sanksinya adalah sanksi moril dimana pengusaha yang membatalkan tersebut akan masuk daftar hitam atau *black list* di Negara importir. Sanksi seperti ini cukup berat bagi eksportir atau importir yang lazimnya selalu mencari relasi baru guna perluasan ekspor impornya.

- b. Sales kontrak ini kemudian oleh importir dibawa ke bank devisa dinegaranya untuk mengajukan permohonan pembukaan *Letter Of Credit*. Di bank devisa tersebut importir mengisi formulir. Semua isi yang tertera dalam sales kontrak terdahulu dituangkan kedalam formulir permohonan *Letter Of Credit*, jelasnya mengenai harga barang, kondisi barang, kualitas barang, cara pengepakan barang, dokumen-dokumen yang di butuhkan di Negara importir, tanggal pengapalan terakhir, serta detail-detail lain yang dibutuhkan dituangkan dalam formulir permohonan *Letter Of Credit*.
- c. Berdasarkan isi formulir permohonan *Letter Of Credit* yang di tanda tangani importir maka pihak bank devisa di Negara importir akan menerbitkan original *Letter Of Credit*
- d. Original *Letter Of Credit* ini di sertai Advice *Letter Of Credit* oleh bank devisa di Negara importir yang dikirimkan ke bank devisa di Negara eksportir (Confirming Bank). Salinan atau tembusan dikirim langsung ke pihak eksportir.
- e. Setelah menerima Advice *Letter Of Credit*, pihak eksportir harus menyadari bahwa pihak importir telah sungguh-sungguh bermaksud bermaksud merealisasi butir-butir yang tercantum dalam sales kontrak yang telah di tanda tangani dan sejak terbitnya *Letter Of Credit*. Maka ini merupakan ikatan hukum yang mengikat kedua belah pihak (eksportir dan importir) serta tidak bias di batalkan oleh salah satu

pihak. Pembatalan salah satu pihak akan menyebabkan tuntutan hukum perdata pada pihak lainnya.

- f. Eksportir kemudian mengirimkan barang ekspornya dari gudang atau pabriknya ke gudang-gudang Lini I di pelabuhan terdekat atau di pelabuhan yang telah ditentukan oleh *Letter Of Credit*.
- g. Jika semua barang yang akan di kapalkan sudah selesai masuk ke gudang Lini I di pelabuhan maka kewajiban eksportir adalah segera mengurus dokumen ekspornya, yaitu formulir PEB (pemberitahuan Ekspor Barang) di ajukan ke Kepala Hangar Bea Cukai setempat. Setelah komoditas diperiksa oleh pemeriksa Bea Cukai maka Persetujuan muat (*fiat Muat*) akan diberikan oleh Kepala Hangar Bea Cukai.
- h. Barang yang sudah masuk gudang menjadi tugas dan tanggung jawab pihak pengusaha yang mengelola gudang Lini I. artinya jika terjadi kerusakan barang, misalkan gudang bocor sehingga barang komoditas mengalami kerusakan/busuk, barang-barang di dalam peti di congkel pencuri sehingga ada kerusakan/cacat, erjadi kebakaran dalam gudang dan lainnya, maka ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pergudangan dan bisa di claim oleh pemilik barang. Tentu pihak kapten kapal tidak akan menerima sebagian barang yang sudah rusak /cacat tersebut. Untuk itu kapten kapal menerbitkan Resi Muat (*Mates Receipt*) yang menegaskan jumlah atau volume barang yang masuk ke

palka kapal. Metris resi muat inilah yang menjadi dasar dan pegangan bagi pengusaha pelayaran guna menerbitkan *bill of lading*.

- i. Setelah eksportir menerima Original bill of lading dari perusahaan pelayaran yang mengangkut komoditas ekspornya, *bill of lading* beserta semua dokumen yang di perlukan sebagaimana disebutkan dalam *Letter Of Credit* di serahkan ke bank devisa yang di tunjuk (*confirming bank*).
- j. Dengan demikian, transaksi ekspor impor di pihak eksportir telah selesai sebab eksportir telah menerima pembayaran uang hasil ekspornya di confirming bank.¹⁷

3. Barang Yang Di Atur Ekspornya

- a. Produk Perkebunan Kopi
- b. Kayu dan Produk kayu
- c. Produksi *industry pulp*
- d. Produk pertambangan intan
- e. Produk manufaktur

4. Barang Yang Diawasi Ekspornya

Alasan dan penetapan terhadap barang yang di awasi ekspornya lebuah disebutkan karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri. Hal ini dilakukan guna:

- a. Menjaga kestabilan perdagangan dan konsumsi dalam negeri.
- b. Menjaga kelestarian alam.

¹⁷*Op.Cit.*, Sasono Herman Budi, hlm. 120-123

- c. Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industry dalam negeri.

5. Barang Yang Dilarang Ekspornya

Penetapan ketentuan terhadap barang yang dilarang ekspornya karena:

- a. Untuk menjaga kelestarian alam
- b. Tidak memenuhi standar mutu
- c. Untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil/pengerajin
- d. Barang bernilai sejarah dan budaya

6. Barang Yang Bebas Ekspornya

- a. Untuk di versikan produk dan diversikan pasar
- b. Pelaksanaan ekspor komoditi yang bebas ekspornya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir

7. Barang Yang Terkena Pajak Ekspor

Komoditi yang terkena pajak ekspor:

- a. Rotan, komoditas ekspor rotan memang harus dikenakan pajak ekspor yang tinggi, mengingat Indonesia adalah Negara produsen rotan terbesar di dunia (95%) produk rotan dunia, sisanya 5% dihasilkan oleh Srilanka. Dengan demikian komoditas rotan mentah yang di hasilkan Indonesia menghadapi bentuk pasar monopoli di pasar internasional). Oleh karena itu, sudah selayaknya ekspor produk rotan mentah dari Indonesia dikenakan pajak pajak ekspor yang tinggi sehingga di harapkan akan meningkatkan daya saing eksportir perabot asal rotan Indonesia di pasar internasional.

- b. Kayu, seperti yang diketahui, masa produksi kayu mulai dari menanam sampai di tebang mencapai umur puluhan tahun. Kayu jati berkualitas minimal berumur 30 tahun; kayu kamper berkualitas minimal 20-25 tahun; kayu suren, kayu kruing berkualitas minimal 15-20 tahun. Mengingat masa tanam kayu yang lama serta tingginya permintaan kayu di dalam negeri maka untuk menjaga kepentingan konsumen di dalam negeri sudah selayaknya ekspor kayu ke luar negeri di kenakan pajak ekspor yang tinggi.
- c. Pasir, mengingat pasir tidak dapat di produksi ulang, kecuali pasir sungai yang mengandalkan pemberian alam melalui aliran air sungai serta pasir gunung yang di bawa oleh larva/lahar dingin dengan mengandalkan meletusnya sebuah gunung berapi, sedangkan pada sisi lain pasir juga sangat dibutuhkan oleh konsumen dalam negeri untuk pembangunan fisik di dalam negeri, maka sudah selayaknya ekspor pasir dikenakan pajak ekspor yang tinggi.
- d. Kelapa sawit, CPO (*Crude Palem Oil*), dan produk turunannya, mengingat sebelum adanya produk minyak goreng yang berasal dari kelapa sawit, minyak kelapa berasal dari perasan kopra daging kelapa tua yang dikeringkan dengan cara tradisional dijemur terik matahari. Maka untuk melindungi kepentingan dalam negeri sudah selayaknya ekspor kelapa sawit, CPO, dan turunannya dikenakan pajak ekspor.¹⁸

¹⁸ Paul L. Frantz, *Bisnis Internasional*, Edisi Sembilan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 105

D. Pengertian Impor

Yang di maksud impor adalah memasukan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean suatu Negara. Jadi jika kapal memasuki daerah pabean, misalnya Indonesia, artinya daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, serta wilayah udara di atasnya dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif serta landas kontinen, maka semua komoditas yang ada di perut kapal masuk dalam kategori barang impor. Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah dipenuhinya kewajiban berikut ini:

1. Barang diimpor untuk dipakai

- a. Memasukan barang kedalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai.
- b. Memasukan barang kedalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

2. Barang diimpor sementara

- a. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impor nyata-nyata dimaksudkan untuk di ekspor kembali.
- b. Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan pabean. Serta penentuan jangka waktu impor sementara diatur lebih lanjut oleh menteri.
- c. Barang siapa yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu sebagaimana oada ayat (3), di kenai

sanksi administrasi berupa denda sebesar seratus persen dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

- d. Tujuan pengaturan impor sementara adalah untuk memberikan kemudahan atas pemasukan barang dengan tujuan tertentu, seperti barang pameran, barang perlombaan, kendaraan yang dibawa oleh wisatawan, peralatan yang digunakan untuk penelitian sains dan teknologi serta pendidikan, peralatan yang digunakan oleh teknisi, wartawan, dan tenaga ahli, untuk di gunakan sementara waktu dan pada waktuimportirnya telah jelas bahwa barang tersebut akan di ekspor kembali.

3. Barang impor ditimbun di tempat penimbunan berikat

Barang-barang impor ditimbun dalam bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.

4. Diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya.

Barang-barang impor ditimbun dalam bangunan atau lapangan atau tempat lain atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara, menunggu pemuatan atau pengeluarannya.

5. Barang impor diangkut lanjut

Barang-barang impor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu.

6. Barang-barang eks-impor diekspor kembali

Barang-barang impor dapat dikeluarkan kembali keluar daerah pabean karena barang-barang import tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan atau oleh karena suatu ketentuan baru dari pemerintah bahwa barang tersebut tidak boleh diimpor de dalam daerah pabean.

7. Barang impor diangkut terus

Barang-barang impor yang diangkut dengan menggunakan kapal pengangkut melalui kantor pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Pemenuhan kewajiban pabean di tempat selain di kantor pabean dapat diizinkan dengan pemenuhan persyaratan tertentu yang akan ditetapkan oleh menteri, sesuai dengan kepentingan perdagangan dan perekonomian. Apabila dengan cara tersebut kewajiban pabean dapat dipenuhi dengan lebih mudah, aman, dan murah, pemberian kemudahan tersebut bersifat sementara.¹⁹

8. Klasifikasi Barang Impor

Sistem klasifikasi barang impor ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006. Pembebanan tarif bea masuk atas barang

¹⁹*Op.cit.*, Sasono Herman Budi, hlm.100.

impor ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006.

Sedangkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dalam rangka skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) for AFTA ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/PMK.010/2006 tanggal 15 November 2006 HS (*Harmonize System*) adalah sistem uraian klasifikasi barang yaitu dengan diberikan penomoran, untuk masing-masing barang yang diselaraskan dan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan perdagangan luar negeri. Dengan memberikan penomoran tersebut menjadi jelas antara macam barang yang satu dengan barang yang lainnya. Dalam satu kelompok barang juga dapat dibedakan dalam kualitasnya, atau ukuran atau cara memprosesnya.

Barang-barang diberikan nomor menurut jenisnya, kemudian setiap jenis tersebut dibedakan lagi secara khusus, tentang modelnya atau kegunaannya atau cara memprosesnya. Kembali kepada definisi UU Nomor 10 Tahun 1995 yang dikaitkan langsung dengan barang yang dapat diklasifikasikan dengan memberikan nomor. Nomor itu terkait erat dengan tarif pungutan bea masuk untuk barang impor dan tarif pajak ekspor untuk barang ekspor. Nomor HS setiap barang oleh petugas Bea dan Cukai akan dicocokkan dengan dokumen yang dilaporkan pihak Importir.

Dalam hal ada keraguan dan/atau kecurigaan, petugas Bea dan Cukai secara selektif memeriksa fisik barang impor tersebut. Dengan menguraikan pengertian barang, menjadi jelas sebagian pengertian impor menurut Undang-Undang. Undang-Undang menegaskan bahwa objek yang diimpor adalah barang, karena terkait langsung dengan tarif bea masuk dengan nomor HS. Nomor HS dimuat dalam dokumen impor oleh eksportir di luar negeri.²⁰

9. Dokumen Ekspor Impor

Semua dokumen yang diperlukan tersebut harus diminta dari eksportir dan di cantumkan dengan jelas, lengkap, dan detail dalam sales kontrak yang ditandatangani bersama eksportir. Dengan sales kontrak inilah pelaku importir datang ke bank devisa setempat dan fungsi formulir permohonan *Latter of Credit*. Semua detail yang tertulis di dalam sales kontrak harus di tuangkan dalam permohonan *Latter of Credit* tersebut. Ini yang menjadi acuan/dasar pihak bank devisa, apa dan bagaimana bunyi *Latter of Credit* yang akan diterbitkan. Selanjutnya L/C inilah yang akan mengikat keempat pihak yang terlibat dalam transaksi ekspor impor, yakni eksportir, importir, Issuing bank di Negara importir, serta Confirming Bank di Negara eksportir.²¹ Beberapa dokumen yang harus diterbitkan sebagai berikut.

- a. **Commercial Invoice:** merupakan factor penjualan (eksportir) yang dikirimkan kepada pembeli (importir).

²⁰*Ibid.*, Sasono Herman Budi, hlm.105.

²¹*Ibid.*, hlm109.

- b. **Consular Invoice:** merupakan consular invoice yang ditandatangani oleh konsul dagang dari Negara importir yang berkedudukan di Negara eksportir.
- c. **Certificate of Origin:** suatu sertifikat yang dibuat oleh kamar dagang dari Negara produsen. Di dalam sertifikat tersebut di jelaskan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil produksi negarapembuatan sertifikat.
- d. **Certificate of Inspection:** merupakan sertifikat yang dibuat independent surveyorperihal barang yang dikirim.
- e. **Certificate of Insurance:** merupakan polis asuransi yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi yang menggunakan barang tersebut, missalnya sewaktu pengiriman barang
- f. **Certifucate Analysis:** merupakan sertifikat atau barang-barang kimia, obat-obatan, dan komoditas yang lain, yang memerlukan analisis, yang menerangkan kadar zat kimia dalam barang-barang kimia atau obat-obatan tersebut, atau analisis kadar protein, ask, moisture, dan lain-lain dari komoditas.
- g. **Delivery Order:** dokumen yang dibetuk di pelabuhan, pembongkaran yang disediakan oleh ngengangkut dan diserahkan pada penerimaan barang.
- h. **Landing Order:** merupakan surat perintah yang dibuat oleh pengangkut yang ditujukan pada nahkoda untuk membongkar sepertiai

barang di suatu pelabuhan yang bukan pelabuhan pembongkaran semula, sebagaimana yang dicatat dalam B/C dan manifest.

- i. ***Freight Manifest***: daftar muatan yang menerangkan berat serta jenis dan satuan barang-barang.
- j. ***Custom Manifest***: daftar muatan yang tidak menyebutkan freight maupun satuan barang-barang.
- k. ***Mates Receipt***: surat muatan yang ditandatangani oleh mualim yang merupakan bukti bahwa barang-barang yang disebutkan benar-benar diangkut dalam kapal.
- l. ***Manufacture's Certificate***: surat keterangan yang dibuat oleh pabrik yang memproduksi barang-barang.
- m. ***Bill of Lading***: surat muatan yang merupakan dokumen yang disiapkan oleh pengangkut yang dibentuk di pelabuhan muat, B/L untuk lautan disebut *ocean B/L* atau *marine B/L*. Fungsi Bill of Lading antara lain:
 - 1) Merupakan surat perjanjian pengangkutan
 - 2) Sebagai tanda bukti penerimaan barang
 - 3) Sebagai tanda bukti hak milik
 - 4) Sebagai tanda pembayaran uang tambang²²

²²*Ibid.*, hlm. 127.

8. Pemeriksaan Fisik Barang-Barang Impor

Selain pemeriksaan administratif, yakni petugas Bea Cukai meneliti semua dokumen barang impor secara selektif dan teliti, pemeriksaan fisik terhadap barang impor yang masih ada di gudang Lini I juga dilakukan, baik ditimbun di dalam gudang ataupun di luar gudang lapangan, baik barang-barang berupa general cargo atau peti-petian maupun barang-barang yang diangkut menggunakan container, baik container yang berada di dalam gudang Lini I dermaga konvensional maupun container yang sedang ditimbun di lapangan terminal Peti Kemas.

a. Pemeriksaan fisik dengan pemindai dapat dilakukan terhadap:

- 1) Barang yang ditetapkan jalur hijau “pemindai peti kemas”
- 2) Barang “satu jenis/satu pos tarif” ditetapkan jalur merah”
- 3) Barang impor dalam *refrigerated container*
- 4) Barang yang beresiko tinggi berdasarkan hasil analisis intelijen
- 5) Barang peka udara
- 6) Barang lainnya atas pertimbangan pejabat yang ditunjuk

b. Dikecualikan:

- 1) Barang impor peka cahaya
- 2) Barang impor yang mengandung zat radioaktif
- 3) Barang impor lainnya yang menjadi rusak jika dipindai.²³

²³*Ibid.*, hlm. 125.

E. *Good Corporate Governance* Menurut Pandangan Islam

Terdapat beberapa prinsip Islam yang mendukung terlaksananya GCG pada perusahaan, yaitu prinsip-prinsip syari'ah. Prinsip syariah tersebut merupakan bagian dari sistem syari'ah. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. *Shidiq*, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan data atau laporan keuangan perusahaan akan dilakukan dengan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) atau yang bersifat dilarang (haram)
2. *Tabligh*, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi karyawan atau para pekerja mengenai prinsip-prinsip yang harus diterapkan. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemahaman prinsip syari'ah semata, namun juga harus mampu mengedukasi mitra kerja ataupun pengguna jasa.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola data dari pengguna jasa ataupun mitra kerja sehingga timbul rasa saling percaya antara pengguna jasa dan mitra kerja kepada pihak perusahaan.
4. *Fathanah*, memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan. Termasuk didalamnya

adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh tanggung jawab (*mas'uliyah*).²⁴

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan diterapkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan prinsip GCG yang dikembangkan saat ini. Point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktifitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip: *Transparansi* atau keterbukaan yang merujuk pada *tabligh*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *mas'uliyah*, *responsibility* merujuk pada *amanah* dan *huriyah*, *independency* pada *istiqomah* dan *huriyah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjadi landasan pada semua institusi ataupun perusahaan secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan social berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan Good Corporate Governance sudah ada yang meneliti khususnya pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

1. M. Finsa Bagus Prastantio dengan judul “Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)” dengan metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif. Hasil

²⁴Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 243-244.

²⁵Muhammad, *Manajemen keuangan syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 211.

penelitian dan analisis tentang Good Corporate Governance pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cab. Palembang penulis mengambil kesimpulan seperti Keterbukaan (Transparency) PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang telah menerapkan keterbukaan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.²⁶

2. Like Monisa Wati, dengan judul “Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dibursa Efek Indonesia” dengan menggunakan Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Untuk pengujian hipotesis menggunakan uji statistik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Good Corporate Governance (CGPI) yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan (ROE dan NPM). Kata kunci : Tata Kelola Perusahaan, Tingkat Pengembalian Ekuitas, Laba Operasi Bersih.²⁷ Iqbal Bukhori, dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010) dengan menggunakan metode random sampling terhadap perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia.²⁸

²⁶ M. Finsa Bagus Prastantio, “Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 27 No. 2 Oktober 2015.

²⁷ Like Monisa, “Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dibursa Efek Indonesia”, *Jurnal Manajemen*, Vol. 01, No.01, September 2012.

²⁸ Iqbal Bukhori, “Pengaruh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010)”, tahun 2012

3. Sarfia Abdul Aziz, dengan judul *Pengaruh Corporate Governance terhadap nilai keuangan sebagai variable intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014*. yang digunakan adalah analisis rasio keuangan untuk mengetahui kondisi rasio keuangan perusahaan dari variabel yang diteliti, analisis jalur (Path Analysis) untuk mengetahui besarnya sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram jalur, uji hipotesis menggunakan t-statistik dan F-statistik selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) CG tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 2) CG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, 3) kinerja keuangan yang diukur dengan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, 4) CG tidak memengaruhi nilai perusahaan melalui kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kinerja keuangan yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti kinerja keuangan yang tinggi dapat memberikan nilai tambah kepada nilai perusahaannya, yang tercermin dengan meningkatnya nilai PBV.²⁹
4. Fifi Widyaningsih, dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)”. Penelitian ini

²⁹ Sarfia Abdul Aziz, “Pengaruh *Corporate Governance* terhadap nilai keuangan sebagai variable intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014”, tahun 2016.

menggunakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2010-2011. Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Analisis data dengan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah corporate governance memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan struktur kepemilikan saham baik kepemilikan dari pihak institusional ataupun manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.³⁰

5. Nano supriatna, dengan judul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ 45)”. Metode penelitian ini menggunakan analisis regresi dummy. Dengan hasil bahwa good corporate governance mempengaruhi kinerja perusahaan. ini membuktikan bahwa semakin baik penerapan good corporate governance dalam suatu perusahaan maka kinerja perusahaan tersebut akan semakin meningkat karena implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang mempraktikkan GCG akan mengalami perbaikan citra dan peningkatan nilai perusahaan.³¹
6. Igam Asri Dwija Putra, dengan judul Peranan Good Corporate Governance dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi. Dengan

³⁰ Fifi Widyaningsih, “Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan”, *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol 2, No2, Oktober 2013.

³¹ Nano supriatna, “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ 45)”, *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI*, Vol. 1, No. 1. 2013.

menggunakan metode empiris hasil dari penelitian adalah Penerapan GCG pada perusahaan akan mampu meminimalkan sifat oportunistis dari para manajemen sehingga berdampak pada perbaikan kinerja perusahaan³²

Adapun Penelitian yang berhubungan dengan Ekspor Impor yang sudah ada yang diteliti. Farah Kamalia Rusmahafi dengan judul “Kontribusi Ekspor Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ekonomi Islam sebenarnya sangat menganjurkan perdagangan sebagai tulang punggung perekonomian³³

Berdasarkan penelitian terdahulu yang terdapat pada tabel tersebut, maka perbedaan dalam penelitian ini terletak pada variabel penelitian yaitu peran Good Corporate Governance. Selanjutnya hasil dari penelitian ini akan dibandingkan dengan guna menemukan hal baru yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Objek dalam penelitian ini Indonesia II (Persero) Cabang Panjang Divisi Terminal Petikemas) dimana *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang tersebut belum pernah diteliti sebelumnya.

³² Igam Asri Dwija Putra, “Peranan Good Corporate Governance dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi,” *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012

³³ Farah Kamalia Rusmahafi, “Kontribusi Ekspor Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Jakarta, Tahun 2012

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang

1. Sejarah PT. Pelabuhan Indonesia II

Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II bermula dari keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP).

Pada tahun 1964, pemerintah menata kembali pengelolaan pelabuhan umum dengan memisahkan aspek operasional dan komersial dalam pengelolaan pelabuhan. BPP yang terdiri dari PN Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII bertanggung jawab terhadap pengelolaan aspek komersial, sementara aspek operasional dikoordinasikan oleh lembaga Administrator Pelabuhan (Adpel). Pada tahun 1983, pemerintah mengubah status BPP menjadi Perusahaan Umum (Perum). Dengan status tersebut, BPP hanya mengelola pelabuhan umum yang diusahakan saja. Sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan langsung oleh Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1983 juncto PP No 5 tanggal 5 Februari 1985, Perum Pelabuhan dilebur dan dibagi menjadi empat wilayah operasi, dengan nama Perum Pelabuhan I sampai IV. Keempat Perum itu merupakan BUMN yang berada di bawah pembinaan Departemen Perhubungan Republik Indonesia selanjutnya bentuk Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan PP No.57 tahun 1991 yang sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II, sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 4 tanggal 5 Mei 1998 yang keduanya dibuat oleh Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta serta telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C2-17612-HT0101TH. 98 tanggal 6 Oktober 1998.

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jakarta dengan wilayah operasi tersebar di 10 provinsi untuk mengelola 12 pelabuhan yang diusahakan yaitu: Pelabuhan Teluk Bayur di Provinsi Sumatera Barat, Pelabuhan Jambi di Provinsi Jambi, Pelabuhan Boom Baru Palembang di Provinsi Sumatera Selatan, Pelabuhan Bengkulu di Provinsi Bengkulu, Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung, Pelabuhan Tanjung Pandan dan Pelabuhan Pangkal Balam di Provinsi Bangka Belitung, Pelabuhan Banten di Provinsi Banten, Pelabuhan Tanjung Priok dan Sunda Kelapa

di Provinsi DKI Jakarta, Pelabuhan Cirebon di Provinsi Jawa Barat, serta Pelabuhan Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu, Perseroan telah merencanakan pembangunan tiga pelabuhan baru yaitu Pelabuhan Kalibaru Utara (Jakarta), Sorong (Papua Barat) dan Batam (Kepulauan Riau).

Selain itu PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) memiliki 3 anak perusahaan dan 2 perusahaan afiliasi. Ketiga anak perusahaan tersebut adalah PT. Rumah Sakit Pelabuhan dengan kepemilikan saham PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99 % dan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebesar 1%. Anak perusahaan yang kedua adalah PT. Multi Terminal Indonesia (MTI) dengan komposisi saham PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) 99% dan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebesar 1%, dan anak perusahaan lainnya adalah PT. Electronic Data Interchange (EDI) Indonesia dengan kepemilikan saham PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II 51% dan PT. Sisiondokom Lintas Buana sebesar 49%. Perusahaan afiliasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) masing-masing adalah PT. Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) dengan kepemilikan saham 51% dimiliki oleh Hutchison Port Holding Group dan Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) sebesar 49%. Sedangkan perusahaan afiliasi yang lainnya yaitu Terminal Petikemas Koja (TPK Koja) yang merupakan kerjasama operasi antara PT.

Pelabuhan Indonesia II (Persero) (55%) dengan Hutchison Port Holding Group (45%) yang telah beroperasi sejak tahun 1998.¹

2. Sejarah PT. Pelindo II Cabang Panjang

Pelabuhan Panjang yang berada di Provinsi Lampung, pada mulanya hanya pelabuhan kecil di Teluk Betung yang disinggahi kapal-kapal motor dan perahu layar yang mengangkat hasil perikanan dan pertanian ke luar daerah dan sebaliknya mengangkut barang-barang dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan Provinsi Lampung. Sejalan dengan adanya peningkatan kegiatan, maka pada abad ke XVII oleh pemerintah Hindia Belanda dibangun Pelabuhan Panjang yang lokasinya 3 km dari pelabuhan lama yang lebih dikenal dengan OOSTHAVEN.

Pembangunan tahap pertama yaitu dermaga panjang 200 meter menggunakan konstruksi Caisson dengan kedalaman 7 m beserta 1 (satu) unit gudang dengan luas 1000m. Selanjutnya, untuk kelancaran angkutan penumpang dari Pulau Jawa-Sumatera atau sebaliknya maka pada tahun 1950 dioperasikan kapal penyebrangan (ferry) Merak-Panjang atau Panjang-Merak yang dikelola oleh Jawatan Kereta Api, dan di Pelabuhan Panjang dibangun stasiun kereta api menuju ke Prabumulih (Palembang)

Setelah selesai pembangunan pelabuhan penyebrangan Bakauheni-Merak pada tahun 1981, maka kegiatan (ferry) dialihkan ke pelabuhan baru tersebut. Sedangkan jalur-jalur rel kereta api tetap dioperasikan untuk angkutan barang umum. Pada saat sekarang,

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Panjang. Diakses pada 15 November 2018.

Pelabuhan Panjang telah tumbuh dan berkembang menjadi pelabuhan samudera yang melayani tidak saja pelayaran antar pulau, namun juga pelayaran internasional.

Pembangunan Pelabuhan Panjang dengan penambahan fasilitas dan peralatan, terus dilakukan secara bertahap sejalan dengan tuntutan permintaan pengguna jasa serta perkembangan perdagangan internasional dan khusus pelayanan peti kemas telah dilengkapi dengan peralatan serta fasilitasnya dan pada 5 September 1996 telah ditetapkan sebagai terminal peti kemas.²

3. Keadaan Geografis dan Topografi Pelabuhan

Panjang Pelabuhan Panjang terletak di Teluk Lampung di bagian selatan pulau Sumatera pada posisi 05°-28'-03" dan 05°-19'-03". Pelabuhan Panjang merupakan satu-satunya pelabuhan laut yang terbuka untuk pelayaran samudera (ocean going) dan pelayaran dalam negeri atau pelayaran nasional (domestic shipping) di provinsi Lampung. Pelabuhan Panjang merupakan pelabuhan alam yang dilindungi oleh beberapa pulau-pulau kecil. Selain itu, Pelabuhan Panjang mempunyai perairan yang cukup dalam (-23M LWS) yang dapat dimasuki kapal-kapal berukuran besar, kondisi ini sangat mendukung bagi keselamatan kapal yang masuk dan keluar dari pelabuhan. Karakter bentang alam PT. Pelindo II Cabang Panjang merupakan dataran luas yang terletak di Teluk ujung pulau Sumatera, yaitu Teluk Betung. Pelabuhan Panjang

²*Ibid.*,

terletak di dekat Bukit Kunyit dan Bukit Karang dari Kecamatan Teluk Betung.

Dilihat dari lalu lintas angkutan laut nasional maupun internasional, lokasi Pelabuhan Panjang merupakan lokasi yang sangat strategis, karena berada di salah satu jalur utama jalur pelayaran nasional dan internasional, yaitu langsung berhadapan dengan Selat Sunda yang merupakan salah satu pintu masuk dari dan Lautan Hindia dari kapal-kapal yang berasal dari Negara-negara timur jauh.

Potensi yang besar ini akan memberikan peluang yang cukup besar untuk pengembangan Pelabuhan Panjang dimasa depan yang dapat memberikan efek domino kepada semua sektor aktifitas ekonomi di Sumatera bagian selatan. Luas daerah pelabuhan meliputi daerah lingkungan kerja daratan 105 Ha dan daerah lingkungan kerja seluas 3.953.490 Ha, yang dapat menampung berbagai aktifitas yang terkait dengan pelayanan jasa dan barang melalui Pelabuhan Panjang. Di pintu masuk pelabuhan terdapat karang yang memanjang dan sekaligus berfungsi sebagai penahan gelombang.³

4. Visi dan Misi Pelabuhan Panjang

Visi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu “Memberikan pelayanan jasa kepelabuhanan secara handal sebagai main port/pelabuhan utama dikawasan Sumatera Bagian Selatan”.

³<http://www.indonesiaport.co.id/read/panjang.html>. Diakses pada 15 November 2017

Misi dari PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yaitu Mewujudkan visi Cabang Pelabuhan Panjang melalui peningkatan komitmen perusahaan kepada mitra dan pelanggan jasa pelabuhan dengan penjabaran komitmen sebagai berikut :

- a. Meningkatkan performance Cabang Pelabuhan Panjang secara profesional dan dapat mendorong kepentingan perekonomian Propinsi Lampung dan wilayah Sumatera Bagian Selatan.
- b. Mendorong terciptanya masyarakat Pelabuhan Panjang yang kooperatif dan memupuk rasa saling memiliki.
- c. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, bermutu, optimis, bersikap melayani dan ramah, bangga pada perusahaan dan berdaya guna serta mampu memberikan kepuasan kepada pengguna dan mitra kerja.⁴

5. Ruang Lingkup

Bidang Usaha PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang yang menjadi penyedia dan pengusaha yaitu sebagai berikut :

- a. Menyediakan dan megusahakan perairan dan kolam pelabuhan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh.
- b. Menyediakan dan mengusahakan pelayanan pemanduan dan penundaan kapal masuk dan keluar pelabuhan, olah gerak kapal di dalam kolam serta jasa pemanduan dan penundaan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

⁴ *Ibid.*

- c. Menyediakan dan mengusahakan jasa dermaga dan fasilitas untuk kapal bertambat serta melakukan kegiatan bongkar muat barang dan hewan.
- d. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas pergudangan dan lapangan tempat penumpukan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan.
- e. Menyediakan dan mengusahakan terminal konvensional, terminal petikemas, dan terminal curah (curah air dan curah kering) untuk melayani bongkar muat komoditas sesuai jenisnya, serta Ro-Ro (*Roll on Roll off*).
- f. Menyediakan dan mengusahakan fasilitas listrik, air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan.
- g. Menyediakan dan mengusahakan jasa pelayanan bongkar muat barang di terminal.
- h. Menyediakan dan mengusahakan lahan untuk berbagai bangunan industri, perkantoran, gudang dan lapangan penumpukan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri.
- i. Penyediaan dan pengusaha jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhanan. Di samping berbagai kegiatan usaha tersebut perusahaan memiliki peluang untuk mengembangkan kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan

kegiatan usaha yang telah ada. Antara lain di bidang jasa informasi, pengelolaan cargo distribution centre, maupun inland container depot dan bidang lainnya baik yang dikelola oleh perusahaan sendiri maupun yang dilaksanakan melalui kerjasama usaha dengan pihak swasta. Sedangkan untuk pelaksanaan pelayanan kepelabuhanan itu sendiri, PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang juga melakukan kerjasama dengan berbagai instansi terkait yang dapat berfungsi untuk memperlancar dalam proses pelaksanaan kegiatan. Instansi-instansi terkait tersebut antara lain :

j. Instansi Pemerintah

- 1) Administrator Pelabuhan, yaitu bertindak sebagai koordinator pelaksana tugas pemerintahan di pelabuhan.
- 2) Syahbandar, yaitu bertugas untuk mengawasi keselamatan pelayaran.
- 3) Keamanan dan Ketertiban, yaitu terdiri dari unsur POLRI serta dibantu dnegan KPLP untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pelabuhan.
- 4) Bea dan Cukai, yaitu bertugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan barang yang keluar dan masuk pelabuhan.
- 5) Imigrasi, yaitu bertugas untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap crew list serta paspor Anak Buah Kapal (ABK).

- 6) Karantina Kesehatan/Tumbuhan, yaitu bertugas untuk melakukan pengecekan administrasi dan fisik di kapal terhadap kesehatan Anak Buah Kapal (ABK), Penumpang dan muatan dalam rangka memastikan/menentukan ABK/penumpang kapal dan muatan dalam keadaan sehat atau tidak mengandung penyakit atau hama yang menular.

k. Penyelenggaraan Pelabuhan

Penyelenggara pelabuhan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Sebagai penyedia dan pengelola jasa kepelabuhanan.

1. Instansi Swasta/BUMN

Sebagai pengguna jasa kepelabuhanan antara lain Perusahaan Pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL).

Secara umum PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Pajang adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tugasnya melayani jasa kepelabuhanan yang dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pelayanan Kapal

a) Jasa Labuh

Jasa labuh merupakan jasa yang diberikan terhadap kapal agar dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayanan kepelabuhanan seperti tambat, bongkar muat atau menunggu pelayanan lainnya (pengurus dokumen dan

lain-lain).Jasa labuh ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan bertabrakandengan kapal lain yang sedang berlabuh sertamemastikan kedalaman air agarkapal tidak kandas dan tidak menunggu alur pelayaran.

b) Jasa Pandu

Jasa pandu merupakan jasa pemanduan kapal sewaktu memasuki alurpelayaran menuju dermaga atau kolam pelabuhan untuk berlabuh sertauntuk menjaga keselamatan kapal, penumpang dan muatannya ketikamemasuki alur pelabuhan.

c) Jasa Tambat

Jasa tambat merupakan jasa yang diberikan untuk kapal bertambat padatambatan dan secara teknis dalam kondisi yang aman untuk dapat melakukan bongkar muat denga lancar dan aman.Jasa tambat juga digunakan untukmenghindari ketidaklancaran pekerjaan bongkar muat barang karenapenggunaan tambatan tidak optimal.

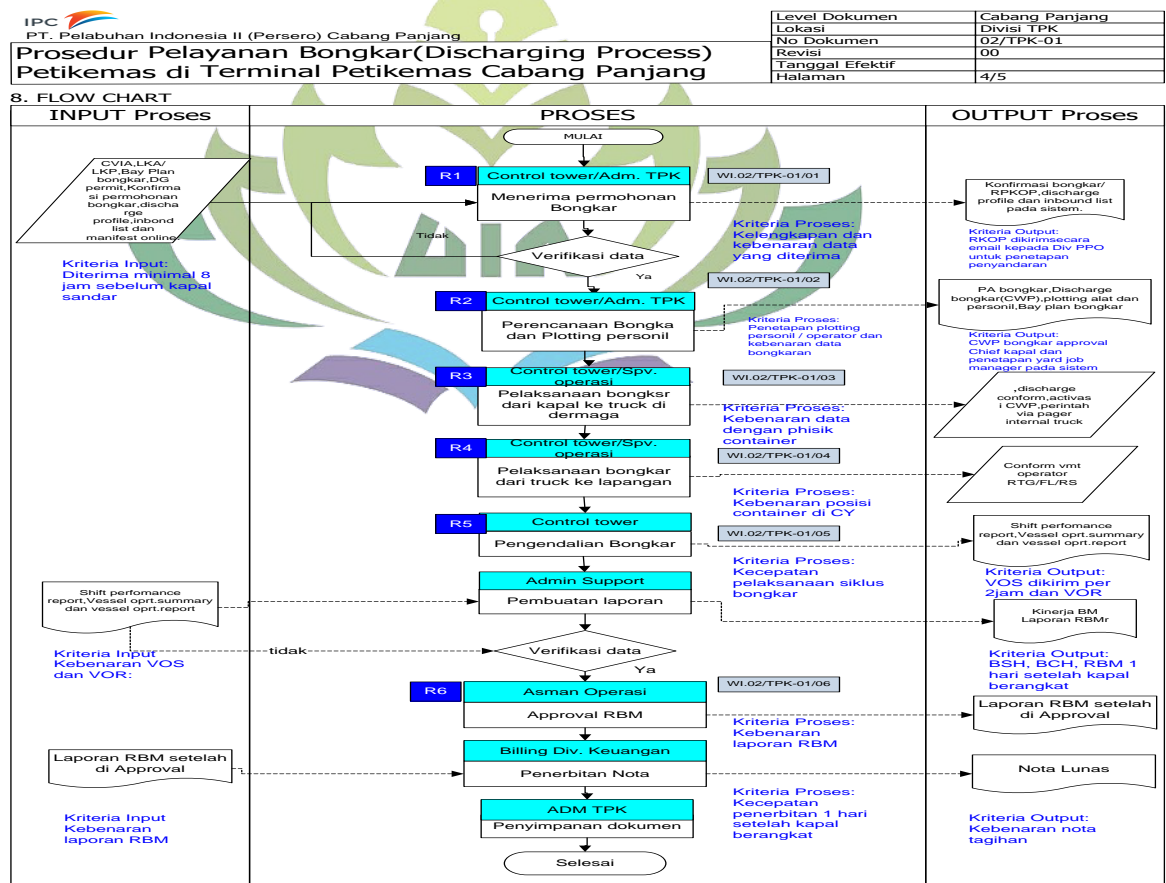
2) Pelayanan Barang

a) Jasa Bongkar Muat

Jasa bongkar muat merupakan kegiatan pelayanan bongkar muat barang sejak dari kapal hingga saat menyerahkan kepada pemilik barang. Jasa bongkar muat ini antara lain Stevedoring, yaitu kegiatan yang dilakukan

sejak membongkar/memuat barang (container) di palka kapal hingga melepas barang (container) di dermaga. Cargodoring, yaitu menyusun barang sejak dari dermaga hingga ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya. Receiving/Delivery, yaitu pekerjaan menyerahkan atau menerima barang di pintu gudang (gate) dari/ke atas truk atau sebaliknya.

Tabel 3.1
Proses Bongkar Muat PT.Pelabuhan Indonesia II



Sumber : Data Tahunan PT. Pelabuhan Indonesia II tahun 2018

b) Pelayanan Dermaga

Pelayanan dermaga dilakukan untuk menangani barang di dermaga dengan mengatur kelancaran arus barang di dermaga.

c) Jasa Penumpukan

Jasa penumpukan merupakan pelayanan penumpukan barang di gudang sampai dengan dikeluarkan dari tempat penumpukan untuk dimuat atau diserahkan kepada pemilik barang. Jasa penumpukan juga yang menentukan ruang tempat penumpukan barang, mengatur penggunaan dan ketertiban ruang penumpukan, meneliti kebenaran jumlah barang serta ukurannya, kondisi kemasan dan jenis barang yang keluar/masuk ke dan dari tempat penumpukan serta ukuran barang yang dibongkar muat, memungut dan menerima sewa penumpukan dan uang dermaga sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Pelayanan Rupa-Rupa

(1) Jasa Persewaan Alat-alat

Pelabuhan Penyewa alat ini bertujuan untuk menunjang kegiatan bongkar muat agar memenuhi sasaran yaitu cepat dan tepat waktu, efisien dan tidak menimbulkan ekonomi atau biaya yang tinggi.

(2) Penyediaan Air Bersih dan Telepon Umum

Penyediaan air bersih merupakan jasa yang diberikan untuk penyerahan air tawar dari darat ke kapal untuk keperluan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK) yang bersumber dari Perusahaan Air Minum, pelabuhan dan perusahaan swasta, sedangkan pelayanan telepon umum sebagai alat komunikasi untuk memperlancar kegiatan yang ada di pelabuhan untuk kepentingan kapal dan Anak Buah Kapal (ABK).

(3) Penyediaan Listrik

Penyediaan listrik di pelabuhan sebagai alat untuk menunjang kegiatan bongkar muat barang dan industri yaitu melalui sambungan tetap dan sambungan sementara.

(4) Pelayanan Jasa Lainnya

Pelayanan jasa lainnya meliputi persewaan tanah dan bangunan, perairan pelabuhan, gudang dan lapangan penumpukan, imbalan jasa alat-alat bongkar muat dan biaya administrasi.⁵

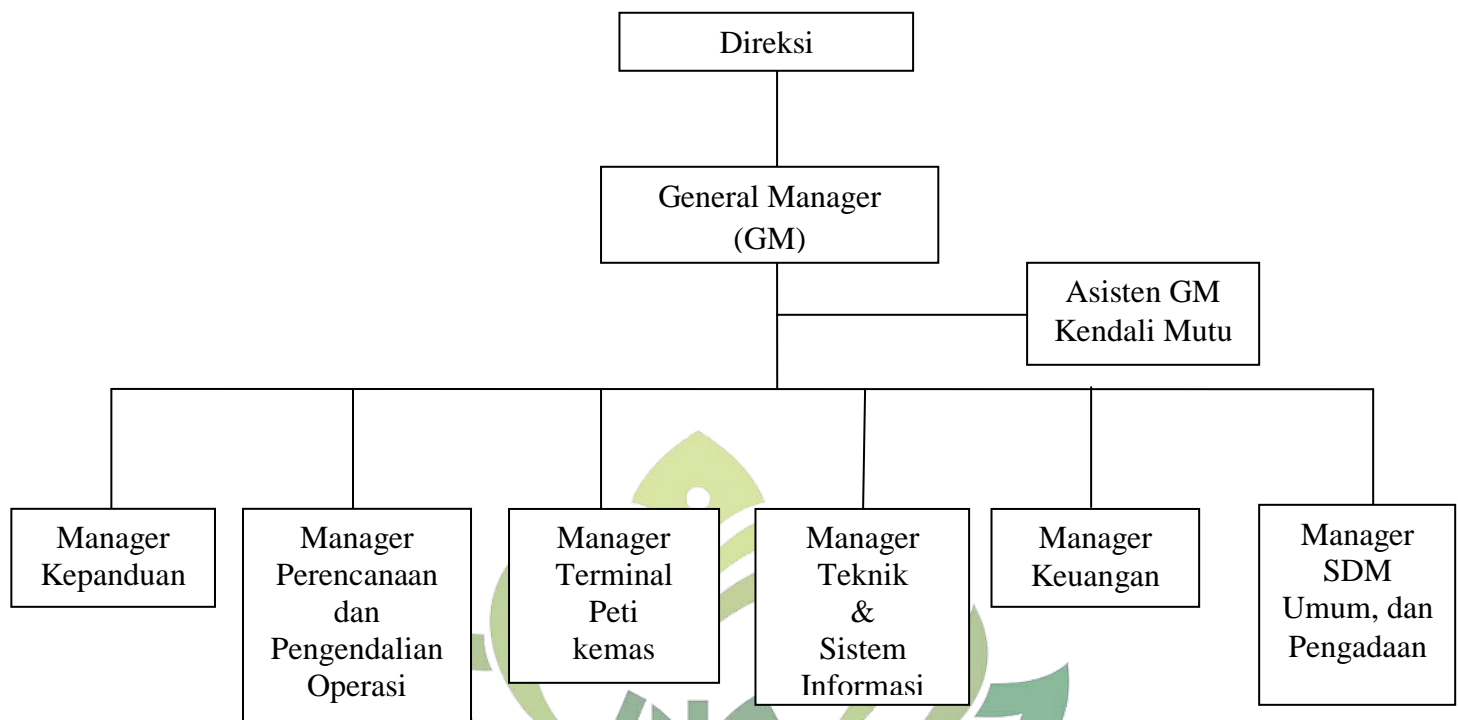
⁵*Ibid.*,

Dalam melakukan semua kegiatan pelayanan kepelabuhanan khususnya bongkar muat barang baik dari kapal ke pelabuhan atau sebaliknya dari pelabuhan ke dalam kapal tentunya diperlukan suatu rencana pekerjaan yang matang agar pelaksanaan kerjanya tidak terjadi kesalahan yang fatal, karena pelaksanaan bongkar muat barang, khususnya Petikemas adalah menyangkut barang milik pihak lain, sehingga tidak boleh terjadi kesalahan agar tidak merugikan banyak pihak. Perencanaan tersebut merupakan tugas dari Divisi Perencanaan dan Pengendalian Terminal Petikemas (TPK) PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang. Divisi Perencanaan dan Pengendalian Terminal Petikemas (TPK) merencanakan segala sesuatu tentang kegiatan yang akan dilakukan di lapangan.

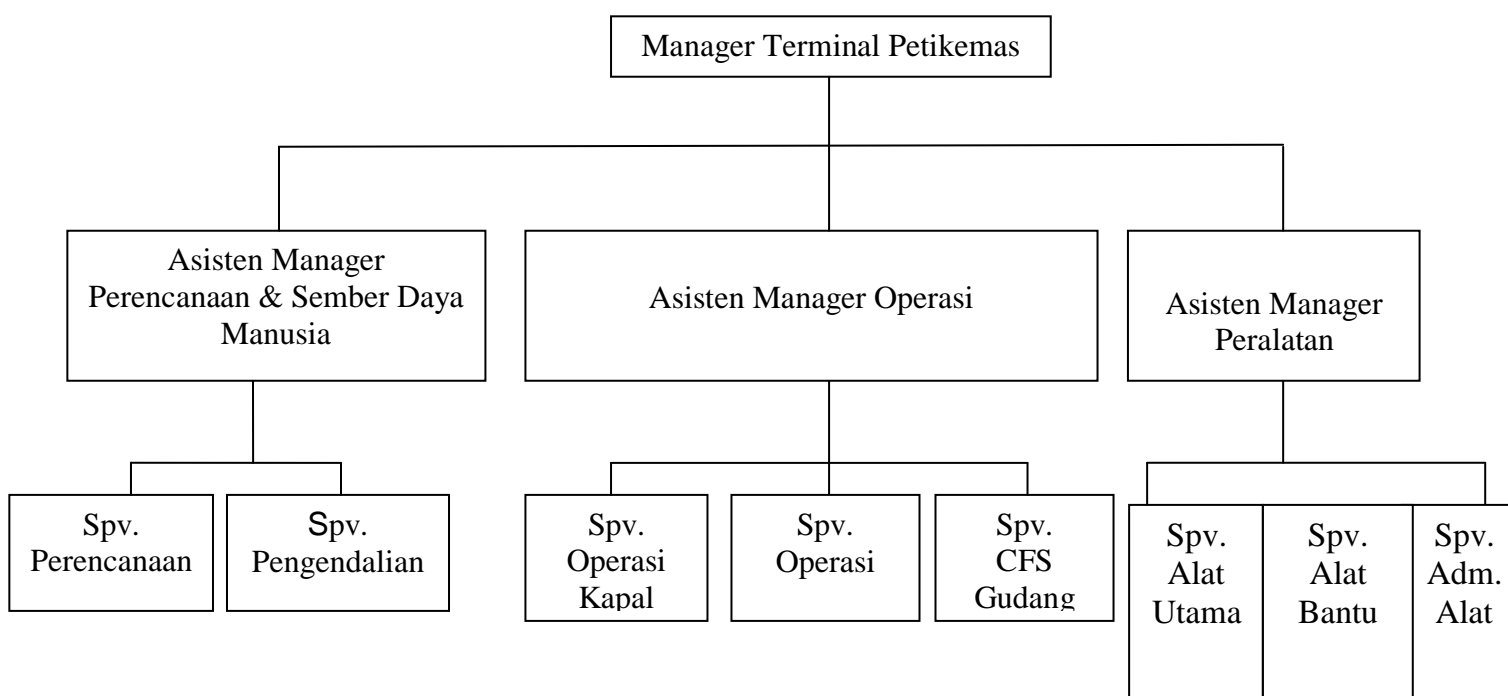
6. Struktur Organisasi

Berdasarkan keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/4/19/PI-II-98 tanggal 17 Desember 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Manajemen Pelabuhan Panjang, struktur organisasi Cabang Pelabuhan Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Struktur Organisasi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang



Tabel 3.3
Struktur Organisasi Divisi Terminal Petikemas PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Panjang



B. Data *Good Corporate Governance* Pelabuhan Panjang

Setelah melakukan berbagai macam prosedur penelitian dari tahap pengumpulan dan pengolahan data yang berasarkan dari hasil wawancara dan kuisioner yang telah disebarkan oleh penulis kepada pihak Pelabuhan Panjang, maka dapat diketahui Peranan *Good Corporate Governance* yang merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam segi teori prinsip-prinsip yang terdapat dari *Good Corporate Governance* pada PT Pelabuhan Indonesia yaitu sebagai berikut :

1. *Transparancy* / Keterbukaan

Transparansi atau keterbukaan yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia yang mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan kepada anggotanya maupun stakeholder lainnya.

Tanggapan responden mengenai pernyataan (J.1) dan (J.2) yaitu penyajian laporan keuangan dan penyajian informasi tentang kerjasama dengan perusahaan lain adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Distribusi Jawaban Indikator *Transparency* / Keterbukaan

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.1	10	16,7	34	56,7	15	25,0	1	1,7	0	0	60	100
2	J.2	8	13,3	26	43,3	25	41,7	1	1,7	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang transparansi terbesar pada butir soal 1 (J.1) berada pada skala 4 (setuju) yaitu sebesar 34 orang responden. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang transparansi terbesar pada butir soal 2 (J.2) terbesar berada pada skala 4 (setuju) yaitu sebesar 26 orang responden.

Prinsip keterbukaan dari PT Pelabuhan Indonesia dalam menyediakan informasi yang riil dan relevan selanjutnya diperkuat dari keterangan Raka septian sebagai salah satu responden dan Admin Terminal Petikemas pelabuhan Panjang terkait penyajian laporan keuangan, dia menyetujui bahwa penyajian laporan keuangan perusahaan dijadwalan setiap bulan secara konsiten. Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai penyajian informasi tentang kerjasama dengan perusahaan lain penyediaan informasi tentang kerjasama dengan mitra atau pengguna jasa menurut beliau sudah jelas, karena dalam hal ini informasi yang terkait data-data yang

lengkap dari mitra atau pengguna jasa harus melengkapkan dokumen, guna melakukan kegiatan ekspor impor.⁶

Keterbukaan informasi dari PT Pelabuhan Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan. Penerapan dan pengelolaan *good corporate governance* (GCG) merupakan sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu. GCG menunjukkan juga kewajiban PT Pelabuhan Indonesia untuk mengungkapkan semua informasi kinerja dalam cakupan ekspor dan impor bahkan dari sisi keuangan dan hutang PT Pelabuhan Indonesia secara akurat, tepat waktu, dan transparan.

Oleh karena itu, baik perusahaan publik maupun tertutup harus memandang GCG bukan sebagai aksesoris, melainkan sebagai upaya peningkatan kinerja dan nilai perusahaan. Hal tersebut telah dilakukan dengan baik dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh PT Pelabuhan Indonesia

2. *Akuntability* / Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. PT Pelabuhan Indonesia yang merupakan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dituntut dalam

⁶Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

melaksanakan kegiatan dalam pengelolaan lembaga sesuai fungsi dan dalam praktek manajemen semua yang terlibat dalam organisasi dari masing-masing pengurus harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan baik sehingga tidak menimbulkan rasa ragu.

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.3) dan (j.4) yaitu terdapat sistem yang baku dan menjalankan prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan.

Tabel 3.5
Distribusi Jawaban Indikator Akuntabilitas

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.3	8	13,3	16	26,7	35	58,3	1	1,7	0	0	60	100
2	J.4	7	11,7	16	26,7	34	56,7	3	5,0	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang akuntabilitas terbesar pada butir soal 3 (j.3) berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 35 orang responden, Kemudian frekuensi jawaban responden tentang akuntabilitas terbesar pada butir soal 4 (j.4) terbesar berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 34 orang responden yang artinya.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait sistem baku yang terdapat di Pelabuhan Panjang, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisioner, karena walaupun PT. Pelabuhan

Indonesia memiliki 2 sistem yang baku seperti angkutan laut atau transportasi laut yang berfungsi untuk mengangkut barang atau perorangan menuju pelabuhan lainnya, dan sistem bongkar muat yang dilakukan di dalam pelabuhan untuk kegiatan ekspor impor, tidak sepenuhnya dipahami oleh seluruh karyawan pelabuhan.⁷ Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisisioner, karena Walaupun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di Pelabuhan Panjang sudah diterapkan masih ada karyawan yang tidak sepenuhnya mengikiti peraturan yang ada.⁸

3. *Responsibility* / Pertanggung-jawaban

Bentuk pertanggung jawaban dari sebuah perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Berdasarkan hasil dari angket atau kuesioner penelitian ini, tanggapan responden mengenai pernyataan (j.5) dan (j.6) yaitu tentang PT Pelabuhan Indonesia II yang menjamin karyawannya dan Perusahaan yang telah melakukan tanggung jawab sosial.

⁷Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

⁸Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

Tabel 3.6
Distribusi Jawaban Indikator *Responsibility* / Pertanggungjawaban

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.5	17	28,3	29	48,3	11	18,38	3	5,0	0	0	60	100
2	J.6	15	25,0	25	41,7	15	25,0	5	8,3	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang *responsibility* atau pertanggungjawaban terbesar pada butir soal 5 (j.5) berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 29 orang responden. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang *responsibility* atau pertanggungjawaban terbesar pada butir soal 6 (j.6) terbesar berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 25 orang responden.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait PT Pelabuhan Indonesia II yang menjamin karyawannya, dia setuju atas jawaban dari responden, karena PT. Pelabuhan Indonesia II sudah memberikan tanggungjawab kepada seluruh karyawannya seperti memberi jaminan kesehatan, dan asuransi jiwa.⁹ Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai perusahaan yang telah melakukan tanggng jawab sosial, dia setuju atas jawaban dari responden, karena PT. Pelabuhan Panjang bertanggungjawab atas kerusakan infrastruktur seperti jalan yang

⁹Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

diakibatkan oleh angkutan dari Pelabuhan atau angkutan dari perusahaan mitra kerjanya.¹⁰

4. *Independency* / Kemandirian

Yaitu memiliki kompetensi, maupun bertindak objektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan lembaga. Dalam pelaksanaan operasionalnya PT Pelabuhan Indonesia tidak diperkenankan mendapat pengaruh dari pihak manapun, yang dalam semua lini usaha bisnis berarti dijalankan secara professional.

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.7) dan (j.8) yaitu tentang seluruh jajaran di perusahaan dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari tekanan berbagai pihak dan tentang perusahaan yang menggunakan tenaga ahli.

Tabel 3.7
Distribusi Jawaban Indikator *Independency* / Kemandirian

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.7	4	6,7	22	36,7	27	45,0	7	11,7	0	0	60	100
2	J.8	6	10,0	31	51,7	20	33,3	3	5,0	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang *Independency* / Kemandirian terbesar pada butir soal 7 (j.7) berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 27 orang responden, kemudian frekuensi jawaban responden tentang *Independency* / Kemandirian terbesar pada butir soal 8 (j.8) terbesar berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 31 orang responden.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait seluruh jajaran di perusahaan dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari tekanan berbagai pihak, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisisioner, karena walaupun dalam hal ini para karyawan mengetahui pedoman GCG (2006) yaitu *Independensi* adalah salah satu prinsip pada *Good Corporate Governance* yang mewajibkan perusahaan harus dikelola secara independen dan Pihak Pelabuhan selalu mengambil keputusan yang objektif namun kegiatan ekspor impor dan bongkar muat tidak selalu efisien.¹¹ Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai perusahaan yang menggunakan tenaga ahli, dia setuju atas jawaban dari responden karena di PT. Pelabuhan Indonesia II memiliki tenaga ahli dalam perusahaan disetiap divisinya.

5. *Fairness* / Keadilan

Prinsip *fairness* atau keadilan adalah yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memengaruhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam prinsip keadilan yang dilakukan

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

oleh PT Pelabuhan Indonesia ketika menjalankan kegiatan usaha nya harus selalu mempertimbangkan kepentingan shareholders dan stakeholderslainnya. Keadilan disini mencerminkan suatu tingkatan yang setara atau sama rata dalam hal perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Adapun ini, ditekankan agar pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan terlindungi dari kecurangan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang dalam.

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.9) dan (j.10) yaitu tentang PT. Pelabuhan Indonesia II yang memelihara data tentang informasi pribadi mitra dan pengguna jasa dan pelayanan perusahaan yang berkualitas.

Tabel 3.8
Distribusi Jawaban Indikator *Fairness* / Keadilan

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.9	10	16,7	36	60,0	13	21,7	1	1,7	0	0	60	100
2	J.10	15	25,0	27	45,0	18	30,0	0	0	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang *Independency* / Kemandirian terbesar pada butir soal 9 (j.9) berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 36orang responden. Kemudian frekuensi

jawaban responden tentang *Independency* / Kemandirian terbesar pada butir soal 10 (j.10) terbesar berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 27 orang responden. Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait PT. Pelabuhan Indonesia II yang memelihara data tentang informasi pribadi mitra dia setuju atas jawaban responden karena PT. Pelabuhan Panjang selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG salah satunya fairness atau keadilan. PT. Pelabuhan Panjang selalumenjagadata tentang informasi pribadi mitra atau pengguna jasa secara memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan data dari pihak eksternal.Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai pengguna jasa dan pelayanan perusahaan yang berkualitas, dia setuju atas jawaban responden karena pihak Pelabuhan selalu melayani pihak pengguna jasa dan mitra dengan baik, karena pelayanan yang baik menjadi prioritas perusahaan.

6. Kualitas

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.12) dan (j.13) yaitu tentang karyawan perusahaan yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab dan karyawan perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II bekerja sesuai SOP.

Tabel 3.9
Distribusi Jawaban Indikator Kualitas

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.12	6	10	24	40,0	26	43,3	4	6,7	0	0	60	100
2	J.13	8	13,3	18	30,0	29	48,3	5	8,3	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang kualitas, terbesar pada butir soal 12 (j.12) berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 26 orang responden. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang kualitas terbesar pada butir soal 13 (j.13) terbesar berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 29 orang responden. Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait karyawan perusahaan yang sudah melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisioner, karena karena untuk menjamin kualitas perusahaan, karyawan PT. Pelabuhan Panjang kurang lebih sudah bekerja sesuai SOP. Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai karyawan perusahaan PT. Pelabuhan Indonesia II bekerja sesuai SOP, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisioner, karena Seluruh karyawan dituntut harus menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, namun terkadang pekerjaannya juga

tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena ada kendala, seperti dokumen yang diperlukan perusahaan kurang lengkap.¹²

7. Kuantitas

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.15) dan (j.16) yaitu karyawan melakukan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja dan kinerja pegawai PT. Pelabuhan Indonesia II terkadang melebihi target yang diberikan.

Tabel 3.10
Distribusi Jawaban Indikator Kuantitas

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.15	19	31,7	27	45,0	12	20,0	2	3,3	0	0	60	100
2	J.16	8	13,3	26	43,3	23	38,3	3	5,0	0	0	60	100

Sumber :Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang kuantitas, terbesar pada butir soal 15 (j.15) berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 26 orang responden, artinya. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang kualitas terbesar pada butir soal 16 (j.16) terbesar berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 26 orang responden. Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait

¹²Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

karyawan melakukan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja dia setuju atas jawaban responden, karena penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja sering dilakukan karyawan karena biasanya data dan dokumen yang diperlukan belum lengkap, dan apabila data dan dokumen yang diperlukan sudah lengkap karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang diberikan perusahaan. Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai kinerja pegawai PT. Pelabuhan Indonesia II terkadang melebihi target yang diberikan dia setuju atas jawaban responden karena para karyawan PT. Pelabuhan Panjang sering melakukan penyelesaian pekerjaan diluar jam kerja untuk mencapai target yang dibebankan oleh perusahaan.

8. Tanggung Jawab

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.15) dan (j.16) yaitu tentang kehadiran atau absensi karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan dan pengukuran kinerja karyawan.

Tabel 3.11
Distribusi Jawaban Indikator Tanggungjawab

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.17	4	6,7	13	21,7	25	41,7	18	30,0	0	0	60	100
2	J.18	6	10,0	26	43,3	22	36,7	6	10,0	0	0	60	100

Sumber :Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang tanggungjawab, terbesar pada butir soal 17 (j.17) berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 25 orang responden. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang kualitas terbesar pada butir soal 18 (j.18) terbesar berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 26 orang responden. Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait tentang kehadiran atau absensi karyawan yang dapat dipertanggungjawabkan, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisioner, karena tanggungjawab karyawan atas kehadiran atau absensi masih ada karyawan yang tidak sepenuhnya mengikuti peraturan yang ada, seperti tidak ada keterangan yang jelas. Meskipun begitu, adapun pengecualian seperti karyawan yang izin cuti, menjalankan kewajiban terhadap Negara, menjalankan ibadah, menjalankan tugas terikat, menjalankan tugas dari perusahaan. Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai pengukuran kinerja karyawan dia setuju atas jawaban responden karena PT. Pelabuhan Panjang juga memiliki kriteria pengukuran kinerja karyawan dengan cara kinerja karyawan yang dilihat dari tanggungjawab penyelesaian pekerjaan dan absensi.¹³

¹³Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

9. Kerjasama

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.19) dan (j.20) yaitu adanya konflik antar karyawan dan perbedaan pendapat.

Tabel 3.12
Distribusi jawaban indikator kerjasama

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.19	6	10,0	34	56,7	15	25,0	5	8,3	0	0	60	100
2	J.20	6	10,0	38	63,3	16	26,7	0	0	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang kerjasama, terbesar pada butir soal 19 (j.19) berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 34 orang responden. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang kualitas terbesar pada butir soal 20 (j.20) terbesar berada pada skala 4 (Setuju) yaitu sebesar 38 orang responden yang artinya. Menurut keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait adanya konflik antar karyawan dan perbedaan pendapat, dia setuju atas jawaban responden karena perusahaan sudah melakukan kerjasama antar karyawan, karena kerjasama adalah salah satu hal yang paling diutamakan, walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ada konflik antar karyawan dan atasan PT. Pelabuhan Indonesia II dapat mengatasi perbedaan pendapat antar karyawan dengan efektif dan untuk mengatasi konflik atau perbedaan

pendapat tersebut, perusahaan selalu mengadakan rapat yang dilakukan beberapa bulan sekali untuk memusyawarahkan masalah perusahaan atau karyawan dan menemukan solusi atas masalah yang ada.¹⁴

10. Inisiatif

Tanggapan responden mengenai pernyataan (j.21) dan (j.22) yaitu tentang inisiatif menyelesaikan tugas baru yang diberikan oleh perusahaan dan karyawan yang mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan.

Tabel 3.13
Distribusi jawaban indikator Inisiatif.

No	Pertanyaan	Jawaban										Total	
		SS (5)		S (4)		N (3)		TS (2)		STS (1)			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	J.21	0	0	22	36,7	37	61,7	1	1,7	0	0	60	100
2	J.22	2	3,3	10	16,7	41	68,3	7	11,7	0	0	60	100

Sumber : Data diolah pada tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas frekuensi jawaban responden tentang kerjasama, terbesar pada butir soal 21 (j.21) berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 37 orang responden. Kemudian frekuensi jawaban responden tentang kualitas terbesar pada butir soal 22 (j.22) terbesar berada pada skala 3 (Netral) yaitu sebesar 41 orang responden yang artinya Menurut

¹⁴Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

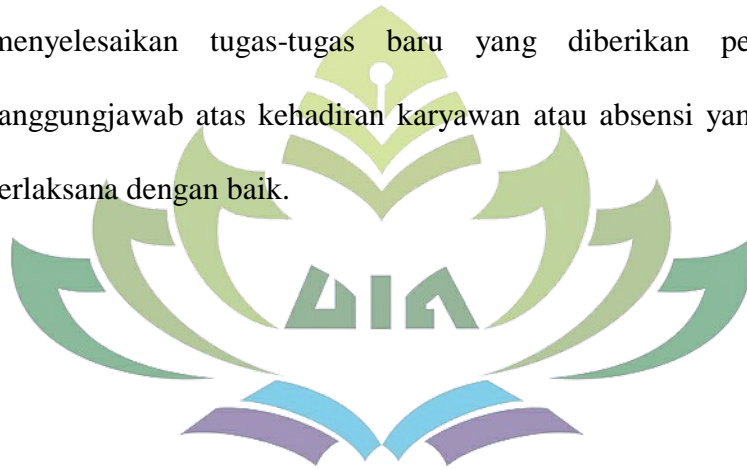
keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait inisiatif menyelesaikan tugas baru yang diberikan oleh perusahaan dan karyawan yang mampu memberikan ide kreatif untuk kemajuan perusahaan, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisioner karena, tidak semua karyawan memiliki inisiatif yang baik untuk menyelesaikan tugas-tugas baru yang diberikan oleh perusahaan, dan walaupun PT. Pelabuhan Panjang setiap beberapa bulan sekali mengadakan rapat terbuka untuk semua divisi termasuk seluruh karyawannya, untuk untuk membangun inisiatif dan menyalurkan ide kreatif atau inovasi dari karyawan demi memajukan perusahaan, tidak semua karyawan mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan perusahaan.¹⁵

Dari data indikator diatas seperti, *Transparancy*, *Akuntability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairness*, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG sudah terlaksana dengan baik seperti laporan keuangan perusahaan yang selalu diterbitkan tetap waktu, dan perusahaan yang bertanggungjawab atas karyawan dan lingkungan perusahaan, namun ada pula indikator GCG yang sudah diterapkan tetapi masih belum terlaksana dengan baik, seperti peraturan perusahaan yang di terapkan namun kurang efisien.

Selanjutnya dari pertanyaan dan jawaban indikator kinerja diatas seperti, kualitas, kuantitas, tanggungjawab, kerjasama, dan inisiatif dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator kinerja di Pelabuhan Panjang

¹⁵Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

sudah terlaksana dengan baik, seperti memberi pelayanan kepada mitra dan pengguna jasa perusahaan dengan kualitas yang baik, dan dengan sudah terlaksananya indikator dari kinerja yaitu kerjasama, perdebatan atau perbedaan pendapat antar karyawan pada saat melakukan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah atau rapat terbuka yang dilakukan perusahaan tiap bulannya. Pengukuran kinerja dalam aspek tanggung jawab dan inisiatif, dinilai belum sepenuhnya terlaksana, hal ini ditunjukkan dengan kurangnya inisiatif beberapa karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugas baru yang diberikan perusahaan, dan tanggungjawab atas kehadiran karyawan atau absensi yang masih belum terlaksana dengan baik.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang

Dalam pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang, kegiatan perdagangan internasional yang dikenal dengan istilah ekspor impor semakin pesat sehingga memacu para penyedia transportasi terutama transportasi laut yaitu perusahaan terminal petikemas untuk memberikan suatu pelayanan yang baik, aman dan efisien. Kegiatan ekspor sebagian besar menggunakan moda transportasi laut dengan sarana kapal, karena dalam pengiriman barang ekspor maupun impor biaya yang dikeluarkan akan lebih murah dan dapat memuat lebih banyak barang sehingga transportasi laut merupakan pilihan utama dalam melakukan kegiatan ekspor impor.

Dalam meningkatkan efisiensi dan keamanan barang yang menggunakan transportasi laut maka diciptakanlah sebuah sarana atau alat yang dipergunakan sebagai suatu tempat untuk menempatkan barang yang akan di ekspor, yaitu petikemas (*container*) tersebut, maka perusahaan terminal petikemas dituntut untuk memberikan suatu penanganan pelayanan barang ekspor pada khususnya dengan menggunakan petikemas (*container*). Dengan semakin meningkatnya permintaan dari pengguna

jasa untuk melakukan kegiatan pengiriman barang yang beragam jenisnya maka diperlukan suatu penanganan muatan ekspor yang penanganannya dari beragam jenis barang tersebut.

Setelah peneliti mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner, selanjutnya peneliti melakukan analisa data berdasarkan data yang telah diperoleh dari wawancara, kuesioner dan dokumentasi yang dilakukan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Secara umum *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Good corporate governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar yang berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah dalam menegakkan *good governance* pada umumnya di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Peranan *Good Corporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan

Panjang menunjukkan bahwa ekspor impor di Pelabuhan Panjang mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan dalam segi ekspor impor. Hal ini ditunjukkan berdasarkan perolehan hasil dari Badan Pusat Statistik mengenai ekspor impor pada tahun 2013 sampai 2015 di Pelabuhan Panjang yang di pimpin oleh Agus Hendrianto selaku General Manager sebagai berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Ekspor dan Impor dalam Ton dari tahun 2013 -2017

TAHUN	EKSPOR	IMPOR
2013	6.851.505	1.004.502
2014	4.138.867	8.874.622
2015	9.260.938	3.138.772
2016	5.951.732	6.852.072
2017	2.788.645	2.212.842

Sumber: Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2013 jumlah ekspor pada pelabuhan panjang sebesar 6.851.505 ton, lalu terjadi penurunan jumlah ekspor pada tahun 2014 sebesar 40% menjadi 4.138.867 ton, pada tahun 2015 jumlah ekspor di pelabuhan panjang mengalami kenaikan sampai 124% menjadi 9.260.938 ton. Pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah ekspor sebanyak 36% atau 5.951.732 ton, dan di tahun 2017 terjadi kembali penurunan jumlah ekspor sampai 53% menjadi 2.788.645 ton.

Peranan GCG dalam peningkatan kinerja ekspor impor dapat dilihat melalui implementasi dari *Transparency*, *Accountability*,

Responsibility, Independency, dan fairness. Sejalan dengan teori *Organization for Economic Cooperation and Development* (2004) dan *Forum for Corporate Governance* Indonesia mendefenisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya. sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan pengukuran *Good Corporate Governance* yaitu dengan *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan fairness.*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti peroleh maka dapat diketahui bahwa Implementasi dari *Good Corporate Governance* pada Pelabuhan Panjang berdasarkan pada teori prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi)

Transparansi merupakan pengungkapan pada setiap kebijakan atau aturan yang akan digunakan perusahaan, sebab kepercayaan mitra, investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat dan tepat waktu. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa menurut Agus Hendrianto selaku General Manager Pelabuhan Panjang pada tahun 2013 penerapan transparansi yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Panjang yaitu dengan cara mempublikasikan laporan keuangan dan

memberikan informasi terkait kerjasama antar mitra kerja atau pengguna jasa. Membuktikan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data kuisioner yang diperoleh peneliti yang menjelaskan bahwa GCG pada PT. Pelabuhan Panjang berdasarkan pada prinsip transparansi terdapat 2 item pertanyaan mengenai hal tersebut.

Respon jawaban pada pertanyaan pertama terdapat 34 orang yang setuju bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II menyajikan laporan keuangan seperti kas, laporan laba rugi, laporan neraca, secara transparan yang jika dipersentasekan adalah sebesar 56, 6%. Respon jawaban pada pertanyaan kedua terdapat 26 orang yang setuju bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II menyediakan informasi tentang kerjasama dengan perusahaan lain dengan jelas yang jika dipersentasekan adalah sebesar 43, 3%.

Prinsip keterbukaan dari PT Pelabuhan Indonesia dalam menyediakan informasi yang rill dan relevan selanjutnya diperkuat dari keterangan Raka septian sebagai salah satu responden dan Admin Terminal Petikemas pelabuhan Panjang terkait penyajian laporan keuangan, dia menyetujui bahwa penyajian laporan keuangan perusahaan dijadwalan setiap bulan secara konsiten. Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai penyajian informasi tentang kerjasama dengan perusahaan lain penyediaan informasi tentang kerjasama dengan mitra atau pengguna jasa menurut beliau sudah jelas, karena dalam hal ini informasi yang terkait data-data yang

lengkap dari mitra atau pengguna jasa harus melengkapi dokumen, guna melakukan kegiatan ekspor impor.¹ Keterbukaan informasi dari PT Pelabuhan Indonesia yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholders dalam setiap pengambilan keputusan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Penerapan akuntabilitas di PT. Pelabuhan Panjang dilakukan dengan cara melakukan pemberkasan yang lebih disiplin terhadap pengguna jasa sehingga hanya pengguna jasa yang telah memenuhi kelengkapan dokumen yang dapat melakukan kegiatan ekspor-impor. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kualitas perusahaan atau meningkatkan kinerja ekspor-impor.

Membuktikan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data kuisioner yang diperoleh peneliti yang menjelaskan bahwa GCG pada PT. Pelabuhan Panjang berdasarkan pada prinsip akuntabilitas terdapat 2 item pertanyaan mengenai hal tersebut. Berikut ini adalah jawaban dari 2 item pertanyaan dalam penelitian ini:

Respon jawaban pada pertanyaan pertama terdapat 16 orang yang setuju bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II terdapat sistem yang baku jika dipersentasekan adalah sebesar 26, 7%. Respon jawaban

¹Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

pada pertanyaan kedua terdapat 16 orang yang setuju bahwa seluruh jajaran di PT. Pelabuhan Indonesia II menjalankan prinsip-prinsip (GCG) dalam setiap kegiatan usaha dalam perusahaan secara efektif jika dipersentasekan adalah sebesar 26, 7%.

Raka septian menjabarkan terkait sistem baku yang terdapat di Pelabuhan Panjang, dia setuju terhadap jawaban netral dari data kuisioner, karena walaupun PT. Pelabuhan Indonesia memiliki 2 sistem yang baku seperti angkutan laut atau transportasi laut yang berfungsi untuk mengangkut barang atau perorangan menuju pelabuhan lainnya, dan sistem bongkar muat yang dilakukan di dalam pelabuhan untuk kegiatan ekspor impor, tidak sepenuhnya dipahami oleh seluruh karyawan pelabuhan.²

3. *Responsibility* (Pertanggung Jawaban)

Penerapan *responsibility* yang dilakukan PT. Pelabuhan Panjang dengan cara memberi jaminan kesehatan dan memberikan tanggung jawab sosial kepada karyawan telah terpenuhi. Hal tersebut memang menjamin hak-hak karyawan, akan tetapi tidak menjamin dapat meningkatkan kinerja ekspor impor. Membuktikan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data kuisioner yang diperoleh peneliti yang menjelaskan bahwa GCG pada PT. Pelabuhan Panjang berdasarkan pada prinsip tanggung jawab terdapat 2 item pertanyaan mengenai hal tersebut.

²Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

Respon jawaban pada pertanyaan pertama terdapat 29 orang yang setuju bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, PT. Pelabuhan Indonesia II menjamin karyawannya dengan ketentuan yang jika dipersentasekan adalah sebesar 48, 3%. Respon jawaban pada pertanyaan kedua terdapat 25 orang yang setuju bahwa berlaku PT. Pelabuhan Indonesia II telah bertindak sebagai warga perusahaan yang baik termasuk peduli dengan lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial jika dipersentasekan adalah sebesar 41, 6%.

Memperkuat penjabaran di atas keterangan yang diperoleh dari Raka septian terkait PT Pelabuhan Indonesia II yang menjamin karyawannya, dia setuju atas jawaban dari responden, karena PT. Pelabuhan Indonesia II sudah memberikan tanggungjawab kepada seluruh karyawannya seperti memberi jaminan kesehatan, dan asuransi jiwa. Selain dari pada itu PT. Pelabuhan Panjang bertanggung jawab atas kerusakan infrastruktur seperti jalan yang diakibatkan oleh angkutan dari Pelabuhan atau angkutan dari perusahaan mitra kerjanya.³

4. *Independency* (Kemandirian)

Penerapan *independency* dilakukan dengan cara mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari berbagai pihak telah dilakukan oleh pihak Pelabuhan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan kualitas kinerja

³Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

ekspor-impor, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien. Membuktikan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data kuisioner yang diperoleh peneliti yang menjelaskan bahwa GCG pada PT. Pelabuhan Panjang berdasarkan pada prinsip kemandirian terdapat 2 item pertanyaan mengenai hal tersebut.

Respon jawaban pada pertanyaan pertama terdapat 22 orang yang setuju bahwa Seluruh jajaran PT. Pelabuhan Indonesia II dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun yang jika dipersentasekan adalah sebesar 36, 1%. Respon jawaban pada pertanyaan kedua terdapat 31 orang yang setuju bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II menggunakan tenaga ahli di setiap bagian dalam pelaksanaan kinerjanya jika dipersentasekan adalah sebesar 51, 7%.

Berdasarkan hal terkait seluruh jajaran perusahaan dapat mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari tekanan berbagai pihak, karena walaupun dalam hal ini para karyawan mengetahui pedoman GCG (2006) yaitu *Independensi* adalah salah satu prinsip pada *Good Corporate Governance* yang mewajibkan perusahaan harus dikelola secara independen dan Pihak Pelabuhan selalu mengambil keputusan yang objektif namun kegiatan ekspor impor dan bongkar muat tidak selalu efisien.⁴ Selain itu keterangan dari Raka septian mengenai perusahaan yang menggunakan tenaga ahli, dia setuju

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Raka Septian (Admin TPk) pada tanggal 17 Februari 2018

atas jawaban dari responden karena di PT. Pelabuhan Indonesia II memiliki tenaga ahli dalam perusahaan disetiap divisinya.

5. *Fairness* (Keadilan)

Keadilan yang diterapkan pihak Pelabuhan Panjang adalah dengan cara menjaga data tentang informasi pribadi dari pengguna jasa atau mitra kerja dan memberikan hak-hak karyawan agar terciptanya etos kerja yang baik dalam perusahaan. Walaupun hal tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, tidak menjamin atau tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja ekspor-impor yang terdapat di PT. Pelabuhan Panjang. Membuktikan hal tersebut dapat diketahui berdasarkan data kuisioner yang diperoleh peneliti yang menjelaskan bahwa GCG pada PT. Pelabuhan Panjang berdasarkan pada prinsip keadilan terdapat 2 item pertanyaan mengenai hal tersebut.

Respon jawaban pada pertanyaan pertama terdapat 36 orang yang setuju bahwa PT. Pelabuhan Indonesia II memelihara data tentang informasi pribadi mitra dan pengguna jasa secara memadai yang jika dipersentasekan adalah sebesar 60 %. Respon jawaban pada pertanyaan kedua terdapat 27 orang yang setuju bahwa Pengguna jasa PT. Pelabuhan Indonesia II diperlakukan dengan hormat, melalui pelayanan yang berkualitas jika dipersentasekan adalah sebesar 45 %.

PT. Pelabuhan Indonesia II yang memelihara data tentang informasi pribadi mitra dia setuju atas jawaban responden karena PT. Pelabuhan Panjang selalu menerapkan prinsip-prinsip GCG salah

satunya fairness atau keadilan. PT. Pelabuhan Panjang selalumenjagadata tentang informasi pribadi mitra atau pengguna jasa secara memadai agar tidak terjadi penyalahgunaan data dari pihak eksternal.Selain itu keterangan dari Raka septian megenai pengguna jasa dan pelayanan perusahaan yang berkualitas, dia setuju atas jawaban responden karena pihak Pelabuhan selalu melayani pihak pengguna jasa dan mitra dengan baik, karena pelayanan yang baik menjadi prioritas perusahaan.

Berdasarkan pada penjabaran hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan dan tergambar dalam penjelasan di atas. dapat diketahui bahwasannya *good corporate governance* secara keseluruhan tidak memberikan peningkatan terhadap kinerja ekspor impor di Pelabuhan Panjang. Hal tersebut diindikasikan bahwasannya prinsip-prinsip GCG digunakan untuk mengatur tata kelola perusahaan dan bukan berfokus pada kegiatan ekspor impor perusahaan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarfia Abdul Aziz bahwa GCG tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan indicator ROA, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya kinerja keuangan yang berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hanya kinerja yang tinggi dapat memberikan nilai tambah kepada nilai perusahaannya, yang berarti perusahaan yang sudah menerapkan GCG masih mengalami kenaikan dan penurunan / fluktuasi.

Selain penerapan GCG, masih ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi meningkatnya kinerja ekspor impor diperusahaan, Faktor-faktor tersebut seperti fasilitas infrastruktur dengan kualitas yang baik serta sumber daya manusia yang kompeten.

B. Peranan *GoodCorporate Governance* Untuk Meningkatkan Kinerja Ekspor Impor Di Pelabuhan Panjang Menurut Pandangan Ekonomi Islam

Terdapat beberapa prinsip-prinsip Islam yang mendukung agar terlaksananya GCG pada setiap perusahaan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang telah dijelaskan sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*, seperti *shiddik*, *amanah*, *fathanah*, dan *istiqomah*.

Transparansi atau keterbukaan yang merujuk pada *tabligh*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *mas'uliyah*, *responsibility* merujuk pada *amanah* dan *huriyah*, *independency* pada *istiqomah* dan *huriyah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Yang mana Islam merupakan seperangkat aturan yang terkandung dalam ajaran ajaran bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadist, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kaum muslimin, menawarkan berbagai cara ataupun kiat dalam menjalani kegiatan yang sesuai dengan norma dan aturan Allah SWT. Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagai mana yang telah diatur oleh Allah SWT, bahwa ukuran baik buruk kehidupan sesungguhnya

tidak diukur dari indikator lainnya, melainkan sejauh mana seorang manusia berpegang teguh kepada kebenaran.

Terdapat beberapa prinsip-prinsip Islam yang mendukung bagi terlaksananya GCG pada PT Pelabuhan Indonesia yang merupakan bagian dari sistem syari'ah. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain sebagai berikut

1. *Shidiq*

Shidiq yang berarti jujur artinya segala yang disampaikan merupakan keadaan yang sebenarnya, memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan data atau dokumen, laporan keuangan dan informasi kerjasama dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram). Karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga mereka menjadi takut untuk melakukan dusta. Dalam Al-Qur'an prinsip shiddiq atau jujur di jelaskan pada Q.S An-Nissa ayat 135 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْلَحُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ وَلِيِّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تُعْرَضُوا أَوْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْدِلُوا أَوْ أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْدِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَدًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan

menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S An-Nissa : 135”)

Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *corporate governance* secara Islam. *Corporate governance* dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan maka tidak ada peluang untuk terjadinya tindak pidana penggelapan, dan perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, *fair*, tidak ada penipuan serta kedzaliman.

Pada PT. Pelabuhan Panjang prinsip Shiddiq sudah diterapkan dengan baik yakni dengan tidak adanya kasus penyalahgunaan data, atau penyelewengan dana, selama PT. Pelabuhan Panjang berdiri belum pernah hal tersebut terjadi. Karena karyawan selalu ditanamkan kedisiplinan dan berakhlakul karimah. PT. Pelabuhan Panjang sendiripun jika ada karyawan yang menyalah gunakan data atau lalai dalam pekerjaannya akan dapat langsung mendapatkan teguran dari pihak perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko reputasi bisa dipercaya pengguna jasa atau mitra kerja. Karena karyawan selalu ditanamkan kedisiplinan dan berakhlakul karimah.

2. Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola data yang diperoleh dari pengguna jasa atau mitra kerja, sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pelabuh dan pihak pengguna jasa atau mitra kerja. Sikap ini memberikan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap lembaga memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas. Sikap amanah akan mendatangkan rezeki karena stakeholder menjadi percaya pada lembaga. Dengan menjaga amanah dapat mengurangi risikohukum, risiko kepatuhan, risiko investasi dan risiko liquiditas. Dalam Al-Qur'an prinsip amanah atau *responsibility* atau bertanggung jawab di jelaskan pada Q.S Al-Anfaal ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut :

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ مُسْتَكْرَمُونَ وَخَوْنُوا وَالرَّسُولَ اللَّهَ تَخُونُوا إِنْ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al-Anfaal : 27)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan PT. Pelabuhan, pihak Pelabuhan panjang sudah menerapkan prinsip amanah yakni dengan

menekankan kepada karyawan memiliki sifat amanah, karena di PT. Pelabuhan Panjang sendiri memiliki motto “memajukan perdagangan, mamajukan Indonesia”. Oleh karena itu karyawan yang sudah dipilih menjadi karyawan PT. Pelabuhan Panjang harus meningkatkan etos kerja serta dapat bertanggung jawab dalam bekerja dengan sepenuh hati dan penuh kesungguhan dan mencurahkan segala potensi yang dimiliki. Demi untuk mewujudkan tujuan organisasi yang bukan hanya sekedar mencari kepentingan pribadi, sehingga timbul jiwa yang amanah, mampu menjalankan tugas dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Amanah disini adalah dengan melaksanakan segala kewajiban sesuai dengan ketentuan Allah dan menjauhi larangan-Nya. Selanjutnya melaksanakan tugas yang dijalankan dengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedurnya, tidak ada unsur kedzaliman, penipuan, dan intimidasi.

3. *Tabligh*

Tabligh berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi karyawan mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syari'ah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi karyawan mengenai manfaat bagi pengguna jasa. Allah swt memerintahkan menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Dengan sikap tabligh diharapkan

dapat menjadi insan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran. Dalam Al-Qur'an prinsip tabligh atau transparansi di jelaskan pada Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut :

لَعَدَلْ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَوِّى اَجَلٍ اِلَى يَدَيْنِ تَدَايُنْتُمْ اِذَا اَمْنُوا الَّذِيْنَ يَتَايَا
فَلْيَكْتُبْ اَللّٰهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبُ اَنْ كَاتِبِيَابَ وَلَا يَابَ

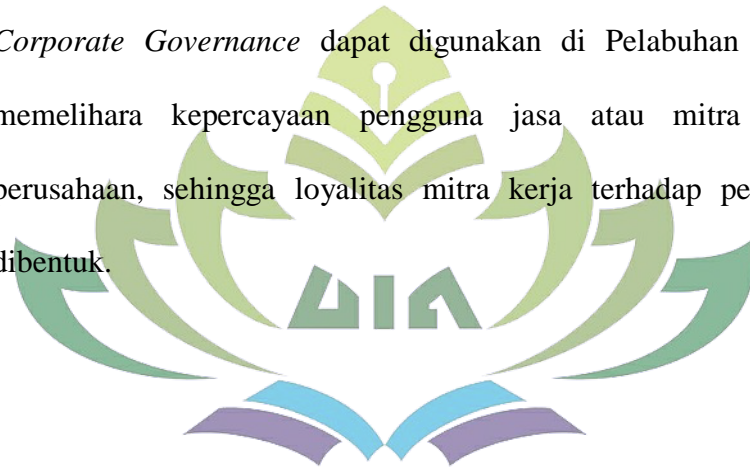
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya (Q.S Al-Baqarah : 282)”

Pada PT. Pelabuhan Indonesia II prinsip tabligh sudah diterapkan oleh pimpinan cabang dengan selalu mengedukasi karyawan tentang masalah bertransaksi yang sesuai dengan syari'ah bebas dari riba dan halal. Ini dilakukan agar tetap menjaga ekonomi negara yang bebas dari riba sesuai dengan islam yang berlaku pada PT. Pelabuhan Panjang demi terciptanya *maslahah lil umah*.

PT. Pelabuhan Panjang dalam prinsip tabligh ini dalam ekonomi islam, sama-sama tholabul ilmi yang pasti Perusahaan itu saling ta'awun atau saling membantu. Karyawan pun dituntut dapat menyampaikan produk-produk yang ada di perusahaan secara baik dan bermuamalah yang baik sesuai dengan prinsip islam. Komunikatif dalam memberikan solusi bahwa kita tidak bisa memberantas tapi kita dapat mengurangi permasalahan ekonomi yang ada. Menjelaskan sebaik mungkin kepada anggota

bahwasanya produk yang ada di PT. Pelabuhan Panjang ini adalah yang terbaik. Sebab terkadang Perusahaan sudah punya akad yang baik tetapi masyarakat yang tidak mau tahu dan ingin segala prosesnya cepat, padahal professional di PT. Pelabuhan Panjang adalah SOP yang sesuai prosedur.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Bagi perusahaan, prinsip *Islamic Corporate Governance* dapat digunakan di Pelabuhan Panjang untuk memelihara kepercayaan pengguna jasa atau mitra kerja kepada perusahaan, sehingga loyalitas mitra kerja terhadap perusahaan dapat dibentuk.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran *Good Corporate Governance* terhadap kinerja ekspor impor PT Pelabuhan Indonesia Panjang yang akan terlihat pada beberapa prinsip sebagai tolak ukur, yaitu sebagai berikut :
 - a. Transparansi, pada penelitian ini ditemukan bahwa prinsip telah diterapkan namun PT. Pelabuhan Panjang tetap mengalami fluktuasi dalam kinerja ekspor impor, artinya indikator transparansi tidak begitu berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekspor impor.
 - b. Akuntabilitas, prinsip ini telah diterapkan dalam segi pemberkasan dokumen sebagai bentuk penunjang kualitas mekanisme ekspor impor pada PT. Pelabuhan Indonesia namun tidak berpengaruh terhadap upaya meningkatkan kinerja ekspor impor.
 - c. Pertanggung jawaban, dengan cara memberi jaminan kesehatan kepada karyawan, namun hasil penelitian ini menemukan bahwa indikator pertanggung jawaban tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekspor impor.
 - d. Kemandirian, dalam pengambilan keputusan secara independen telah diterapkan oleh PT. Pelabuhan namun tidak sepenuhnya berjalan dengan efektif dan efisien.
 - e. Keadilan, dalam penelitian ini ditemukan bahwa prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ekspor impor.

2. Menurut teori ekonomi Islam, kinerja dari PT Pelabuhan Indonesia II didasari pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* tercermin pada nilai-nilai Islam antara lain sebagai berikut :

- a. Shidiq (prinsip kejujuran)
- b. Amanah (dapat dipercaya)
- c. Tabligh (menyampaikan)

Dimana prinsip-prinsip tersebut sudah diterapkan dalam sistem GCG pad PT Pelabuhan Indonesia II untuk memelihara kepercayaan pengguna jasa atau mitra kerja kepada perusahaan, sehingga loyalitas mitra kerja terhadap perusahaan dapat dibentuk.

B. Saran

Semoga penelitian ini bermanfaat sebagai sumber ilmu dan wawasan untuk penelitian yang akan datang, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang penulis menyarankan beberapa hal seperti, melakukan survey atau wawancara terhadap seluruh instansi yang berhubungan dengan pelabuhan guna mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan yang mengatur teknis pelaksanaan ekspor dan impor di PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Panjang
2. Untuk PT. Pelabuhan Indonesia II cabang Panjang yang selalu melakukan kegiatan bongkar muat dan ekspor impor harus selalu memperhatikan atau melakukan pengecekan terhadap dokumen-

dokumen pengguna jasa atau mitra kerja agar kegiatan bongkar muat atau kegiatan ekspor impor dapat berjalan dengan baik, dan pengecekan pada alat-alat atau fasilitas yang digunakan untuk melakukan kegiatan bongkar muat sebelum di operasikan, karena dari penelitian ini ditemukan bahwa terdapat alat seperti *crane* dan *forklift* yang tiba-tiba tidak dapat dioperasikan karena mengalami kerusakan atau kehabisan bahan bakar saat proses bongkar muat berlangsung, hal mengakibatkan proses bongkar muat terhambat.



8DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014.
- Achmad D. Mas. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* Ed.2. Jakarta:Jagad Prima Mandiri.
- Adrian D. Lubis, *jurnal Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 4 No. 1, Jakarta . 2010.
- Adrian Sutedi, 2009, *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arifin, 2005, *Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia*, Semarang,, Undip
- Bagus M. Minsa Prastantio, 2012, *Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Malang, jurnal ekonomi, No. 1
- Bangun, Wilson. “*Manajemen Sumber Daya Manusia*”. Jakarta: Erlangga. 2012
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997
- Daniri Achmad, 2005, *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : PT Ray Indonsia
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Donelly, Gibson and Ivancevich, 1994, *Organisasi dan Manajemen. Perilaku, Struktur, Proses*. Edisi keempat. Jakarta: Erlangga. \
- Farah Kamalia Rusmahafi, *Kontribusi Ekspor Impor Terhadap Pendapatan Negara Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta, Tahun 2012
- Fifi Widyaningsih, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2013
- Forum for Good Corporate Governance in Indonesia, (FCGI) 2001*, seri tata kelola perusahaan yang baik, edisi 3 jilid 1. Jakarta
- Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta, UGM, 2002
- Hamzah Ahmad Nanda Santoso,1996, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya : Fajar Mulia

.
<http://www.indonesiaport.co.id/read/panjang.html>. Diakses pada 15 November 2017
Husein Umar, Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003

Igam Asri Dwija Putra, Peranan Good Corporate Governance dan Budaya Terhadap Kinerja Organisasi, *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012

Iqbal Bukhori, Pengaruh Good Corporate Governance dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI 2010), tahun 2012

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 2014, Yogyakarta : Pustaka Mahardika.

Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 2001,

Like Monisa, Pengaruh Praktek Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan dibursa Efek Indonesia, *Jurnal Manajemen*, Volume 01, Nomor 01, September 2012

M. Finsa Bagus Prastantio, Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang) *Jurnal Administrasi Bisnis* vol. 27 No. 2 Oktober 2015

Moh. Pabundu Tika, Metode Riset Bisnis, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006,

Nano supriatna, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. (Studi Kasus Pada Perusahaan Yang Termasuk Dalam Indeks LQ 45), *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI*, Vol. 1, No. 1

Paul L. Frantz. 2005. *Bisnis Internasional. Edisi Sembilan*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Prabu Anwar Mangkunegara, 2009, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

Rachmadi Usman, 2014, *Aspek Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: PT sinar Grafika

Sarfia Abdul Aziz, Pengaruh *Corporate Governance* terhadap nilai keuangan sebagai variable intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014, tahun 2016

Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta, Mandar maju

Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, CV Alfa Beta, Bandung, 1998,

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung, Alfabeta, 2009

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012

Suharsimi Arikunto, Metodologi penelitian, Bina Aksara, Yogyakarta , 2006

Supriyanto, 2000, The Indonesian Institute For Corporate Governance, Jurnal Ekonomi, No. 1

Tambunan, Tulus T.H. (2001). Kinerja Ekspor Manufaktur Indonesia. Kompartemen Industri Logam Dasar & Mesin dan LP3E, Kadin Indonesia, 2001

Tim Prima Pena, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.Terbaru, Makasar : Gitamedia Press.

